

## 4.2. KINERJA MAKRO EKONOMI.

### 4.2.1. ANGKA KONSUMSI RT PER KAPITA JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011.

Berdasarkan  
hasil Survei Sosial  
Ekonomi Nasional  
(Susenas) 2009-2011  
di Jawa Timur, terjadi  
peningkatan rata-rata  
konsumsi per kapita,  
yang semula Rp.  
380.163 per kapita  
sebulan di tahun  
2009 menjadi Rp.  
408.038 per kapita

Tabel 4.167 Rata-rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi dan Status Wilayah di Jawa Timur 2009- 2011 (Rupiah per Bulan)				
	Tahun/ Status Wilayah	Makanan	Bukan Makanan	Total
2009	Kota	219.238	217.742	436.980
	Desa	169.502	116.847	286.349
	<b>Kota+Desa</b>	<b>200.478</b>	<b>179.685</b>	<b>380.163</b>
2010	Kota	244.457	224.564	469.021
	Desa	189.000	118.345	307.345
	<b>Kota+Desa</b>	<b>223.539</b>	<b>184.499</b>	<b>408.038</b>
2011	Kota	287.360	329.431	616.790
	Desa	207.963	160.118	368.082

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

sebulan di tahun 2010 dan di tahun 2011 besarnya menjadi Rp. 486.426 per kapita sebulan. Sehingga selama 2010-2011 terjadi peningkatan sebesar 19,21 persen selama setahun, lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode 2009-2010 yang mengalami peningkatan sebesar 7,33 persen selama setahun. Namun demikian, dalam menafsirkan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita ini perlu kehati-hatian, karena belum tentu menjadi gambaran peningkatan kesejahteraan. Mengingat peningkatan konsumsi bisa dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan harga yang terukur melalui inflasi, bukan karena pendapatan yang meningkat. Selain dengan melihat tingkat inflasi, perilaku konsumsi terkait dengan pendapatan yang terdapat dalam Hukum Engel<sup>1</sup> dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi ini.

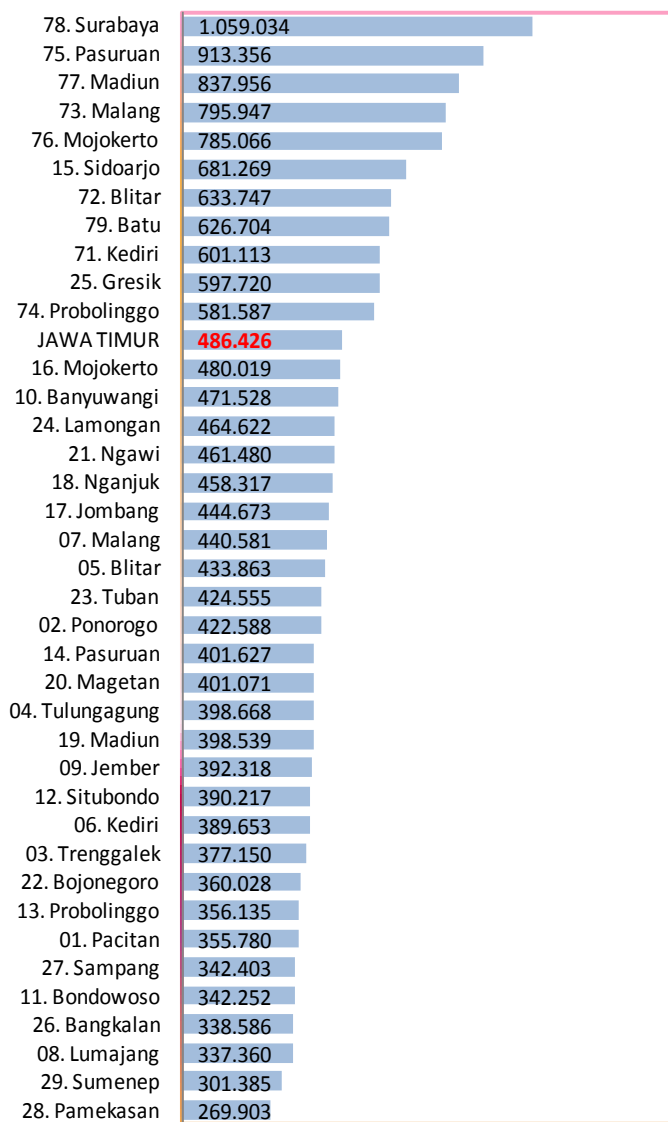
1 Dalam Hukum Engel (Engel, Ernst; 1857, 1895) menyebutkan bahwa persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Berdasarkan tingkat inflasi tahun 2011 yang sebesar adalah 4,09 persen<sup>2</sup>. Bila dibandingkan dengan kenaikan konsumsi per kapita 2010-2011, ternyata tingkat inflasi tahun 2011 lebih rendah. Sementara itu bila menggunakan Hukum Engel, terjadi penurunan persentase konsumsi pada kelompok makanan di Jawa Timur dari 54,78 persen tahun 2010, menjadi 50,52 persen tahun 2011. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

berdasarkan tingkat inflasi dan perilaku konsumsi dalam Hukum Engel, maka peningkatan rata-rata konsumsi per kapita 2010-2011 dapat menjadi indikasi terjadinya peningkatan tingkat pendapatan atau kesejahteraan penduduk di Jawa Timur.

Pada wilayah mana situasi tingkat kesejahteraan tersebut terjadi, maka amatan dilakukan menurut wilayah perdesaan dan perkotaan. Karena dalam penghitungan inflasi hanya terbatas pada cerminan harga konsumen dan tidak dapat dipecah dalam wilayah perdesaan atau

**Gambar 27**  
**Sebaran Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan**  
**(Rupiah) menurut Kabupaten/Kota**  
**di Jawa Timur 2011**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

<sup>2</sup> Inflasi dapat digunakan dalam pembahasan ini, namun dengan asumsi kuantitas dan kualitas dari yang dikonsumsi selama 2010 dan 2011 relatif sama,

perkotaan, maka Hukum Engel digunakan untuk menjelaskan situasi ini. Selama 2010-2011 di Jawa Timur, persentase konsumsi makanan di wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi di wilayah perkotaan, dari 52,12 persen menjadi 46,59 persen atau turun sebesar 10,61 persen poin. Sedangkan pada wilayah perdesaan mengalami penurunan sebesar 8,12 persen poin, dari 61,49 persen menjadi 56,50 persen.

**Tabel 4.168**  
**Persentase Total Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan**  
**menurut Status Wilayah dan Kuintil Penduduk**  
**di Jawa Timur 2009-2011**

Tahun/ Wilayah (Kota/Desa)		Kuintil Penduduk berdasarkan Konsumsi					Gini Rasio
		1	2	3	4	5	
<b>2009</b>	Kota	7,98	12,13	15,76	21,46	42,68	<b>0,31</b>
	Desa	9,38	14,20	17,99	21,65	36,78	<b>0,25</b>
	<b>Kota+Desa</b>	<b>8,18</b>	<b>12,73</b>	<b>15,94</b>	<b>21,04</b>	<b>42,13</b>	<b>0,29</b>
<b>2010</b>	Kota	8,57	12,12	15,65	21,04	42,62	<b>0,31</b>
	Desa	10,97	14,63	17,69	21,71	35,01	<b>0,22</b>
	<b>Kota+Desa</b>	<b>9,09</b>	<b>12,55</b>	<b>15,95</b>	<b>21,13</b>	<b>41,28</b>	<b>0,31</b>
<b>2011</b>	Kota	7,44	10,62	14,45	20,69	46,80	<b>0,36</b>
	Desa	9,56	12,75	16,18	21,48	40,03	<b>0,28</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

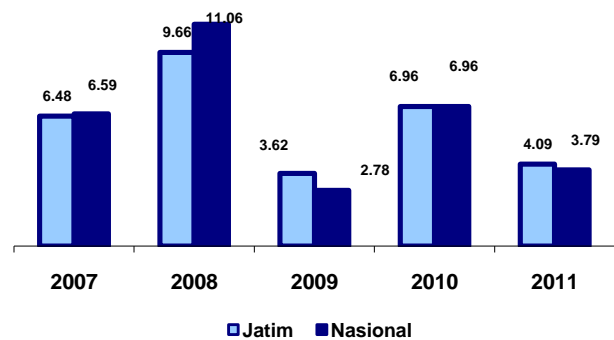
Berdasarkan besaran rata-rata konsumsi per kapita penduduk selama sebulan menurut kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011, Kota Surabaya merupakan wilayah yang tertinggi, diikuti oleh seluruh Kota di Jawa Timur, serta hanya Sidoarjo (urutan keenam) dan Gresik (urutan kesepuluh), kabupaten yang berada di antara sepuluh besar tertinggi. Untuk rata-rata konsumsi per kapita terendah di Jawa Timur tahun 2011, adalah Kabupaten Pamekasan, diikuti Sumenep, dan Lumajang (tiga wilayah terendah). Namun demikian, bukan berarti rata-rata konsumsi per kapita sebulan yang lebih tinggi atau rendah, menjadi cerminan tinggi atau rendah pula kondisi tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Mengingat tingkat kemahalan antar wilayah sangat bervariasi, maka perlu kehati-hatian dalam menerjemahkan situasi ini. Cerminan perbedaan kemahalan wilayah ini

tercermin dari keberadaannya wilayah-wilayah kota pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Kabupaten. Padahal secara umum memang di wilayah kota memiliki tingkat kemahalan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Selain itu, deviasi yang ada antar wilayah di Provinsi Jawa Timur diindikasikan cukup lebar, karena rata-rata konsumsi provinsi yang berada pada posisi moderat, memisahkan 11 wilayah di atas dan 27 wilayah di bawah rata-rata konsumsi per kapita provinsi.

#### 4.2.2. LAJU INFLASI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011

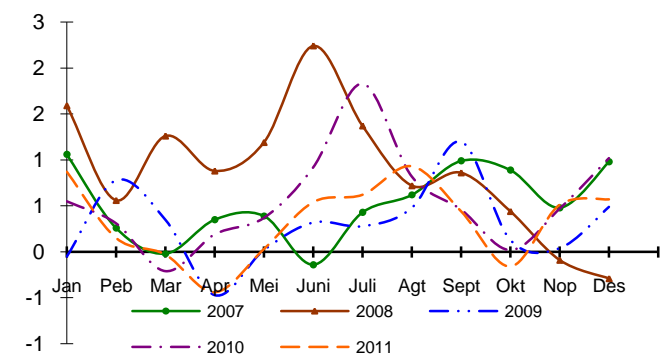
Laju inflasi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir masih tergolong dalam kategori rendah, masih dibawah 2 digit. Kondisi yang cukup rawan hanya terjadi pada tahun 2008 dengan laju inflasi cukup tinggi yaitu 9,66 persen akibat naiknya harga BBM seiring dengan tidak terkendalinya harga minyak dunia. Walaupun kenaikan BBM di tahun 2008 tersebut sempat dikoreksi di penghujung tahun, namun *multiplier effects* akibat kenaikan tersebut sudah terlanjur terjadi sehingga inflasi hampir menembus dua digit

**Gambar 28**  
Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2007-2011



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

**Gambar 29**  
Inflasi Bulanan Jawa Timur Tahun 2007-2011

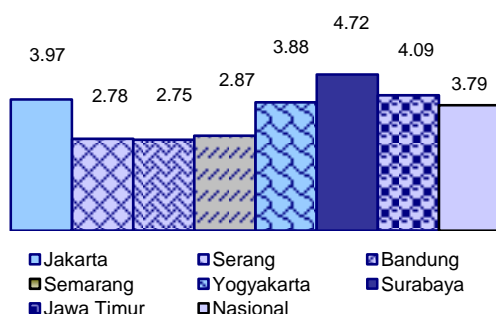


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan inflasi Jawa Timur tahun 2011 mengalami sembilan kali inflasi dan tiga kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,93 persen dan terendah bulan Mei sebesar 0,03 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 0,44 persen dan deflasi terendah bulan Maret sebesar 0,03 persen. Inflasi yang cukup tinggi juga terjadi pada bulan Januari dan Juli.

Pada tahun 2011 tercatat beberapa kebijakan pemerintah yang memicu tingginya inflasi. Setelah Pemerintah menaikkan bea cukai rokok yang diberlakukan pada awal tahun 2011 dan pengusaha menaikkan harga rokok selama tahun 2011 secara perlahan sehingga secara kumulatif inflasi rokok cukup tinggi. Inflasi juga semakin terdorong dengan adanya pengaruh krisis perekonomian Negara Eropa dan Amerika yang ditandai dengan naiknya *harga emas dunia* karena banyak para investor cenderung menanamkan investasi kepada emas daripada surat berharga. Kumulatif inflasi Jawa Timur tahun 2011 ditutup sebesar 4,09 persen, lebih tinggi disbanding inflasi nasional sebesar 3,79 persen.

**Gambar 30**  
**Kumulatif Inflasi Ibukota Provinsi**  
**di Pulau Jawa dan Jawa Timur Tahun 2011**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Jika dibandingkan dengan inflasi ibukota provinsi di pulau Jawa, inflasi Jawa Timur lebih tinggi dari inflasi Nasional, Jakarta, Jogjakarta, Semarang, Serang dan Bandung, namun lebih rendah disbanding dengan Surabaya. Di antara ibukota provinsi di pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi Surabaya sebesar 4,72 persen dan terendah terjadi di Bandung

sebesar 2,75 persen.

**Tabel 169**  
**10 Komoditas Pendorong Utama Inflasi Jawa Timur**  
**Tahun 2007-2011 (%)**

No.	Komoditas	2007		2008		2009		2010		2011	
		Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
1	Beras	6.9229	0.4300	-	-	10.7566	0.4757	22.7930	1.0279	14.4893	0.7672
2	Kontrak Rumah	6.5839	0.2546	-	-	2.8856	0.0801	-	-	-	-
3	Rokok Kretek Filter	7.4195	0.2223	-	-	5.8133	0.1183	8.6603	0.1749	11.0978	0.2270
4	Daging Ayam Ras	15.5474	0.2272	-	-	-	-	-	-	13.8463	0.1387
5	Biaya SLTA	-	-	-	-	10.5411	0.1057	12.2086	0.1299	12.3040	0.1402
6	Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1119	0.1320
7	Biaya Akademi/PT	9.8210	0.2097	-	-	10.7378	0.1361	-	-	7.9703	0.1113
8	Gula pasir	-	-	-	-	60.5381	0.4894	-	-	-	-
9	Emas Perhiasan	30.5220	0.3026	22.3095	0.3713	15.4618	0.2702	14.8924	0.3361	18.2763	0.4021
10	Mie	-	-	22.8475	0.3517	-	-	-	-	-	-
11	Minyak Goreng	50.7610	0.6898	-	-	-	-	13.4424	0.1631	-	-
12	Bawang Merah	139.2345	0.4992	-	-	-	-	72.7592	0.2182	-	-
13	Kelapa	79.4551	0.2688	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Telur Ayam Ras	20.2481	0.1530	30.1216	0.2143	-	-	-	-	-	-
15	Bensin	-	-	14.2975	0.5926	-	-	-	-	-	-
16	Bahan Bakar RT	-	-	19.1894	0.5522	-	-	-	-	-	-
17	Tempe	-	-	46.2886	0.2879	-	-	-	-	-	-
18	Tahu Mentah	-	-	52.3996	0.2864	-	-	-	-	-	-

No.	Komoditas	2007		2008		2009		2010		2011	
		Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi			Inflasi	Sumbangan	Inflasi
19	Angkutan dlm Kota	-	-	26.4197	0.2690	-	-	-	-	-	-
20	Daging Sapi	-	-	23.4357	0.2672	-	-	-	-	-	-
21	Semen	-	-	29.2859	0.2445	-	-	-	-	-	-
22	Mobil	-	-	-	-	12.7472	0.2448	-	-	-	-
23	Bawang Putih	-	-	-	-	175.7789	0.2318	46.8516	0.1668	-	-
24	Cabe Rawit	-	-	-	-	38.7866	0.0887	151.3013	0.4249	-	-
25	Jasa STNK	-	-	-	-	-	-	47.5089	0.3199	-	-
26	Tarif Listrik	-	-	-	-	-	-	11.8136	0.3179	-	-
27	Sewa Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9242	0.1311
28	Upah Pembantu RT	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9348	0.1048
29	Rokok Kretek	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2833	0.1030

Dilihat dari komoditinya, sepuluh penyumbang terbesar terhadap inflasi Jawa Timur pada Tabel 4.2 terlihat, bahwa tingginya inflasi tahun 2007 sangat dipengaruhi oleh naiknya harga beras dan daging ayam ras. Namun demikian, peranan beras dan daging ayam ras tidak terlihat menonjol di tahun 2008 tetapi kembali berperan terhadap inflasi Jawa Timur tahun 2009, 2010 dan 2011.

Sementara itu, dalam kurun waktu lima tahun terakhir komoditas emas perhiasan selalu memegang peranan penting terhadap inflasi Jawa Timur. Naiknya harga emas dunia seiring dengan melemahnya nilai tukar, krisis Negara Eropa dan Amerika serta berpindahnya pola investasi ke emas murni mengakibatkan tekanan terhadap inflasi menjadi semakin besar.

Secara khusus, sumbangan tertinggi terhadap inflasi Jawa Timur tahun 2011 disebabkan naiknya harga beras yang cukup tajam disamping naiknya harga emas perhiasan, biaya daging ayam ras, biaya pendidikan di SLTA, rokok kretek filter, rokok kretek, biaya akademi perguruan tinggi, sepeda motor, sewa rumah dan upah pembantu rumah tangga.

#### **4.2.3. PDRB PER KAPITA JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011**

Kondisi perekonomian Jawa Timur menunjukkan perkembangan cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRBnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini akan lebih berarti jika angka per kapita yang diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun juga mengalami peningkatan.

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir (periode 2007-2011), PDRB per kapita penduduk Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 14,55 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 16,75 juta pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2009 PDRB per kapita Jawa Timur meningkat sebesar



Rp. 18,42 juta di tengah-tengah kekhawatiran krisis global finansial. Pada tahun 2010 angka ini mencapai Rp. 20,77 juta, dan selanjutnya pada tahun 2011 PDRB per kapita meningkat menjadi Rp 23,46 juta, dampak dari semakin membaiknya kondisi perekonomian domestik.

**Tabel 4.170**  
**PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2007-2011**

Uraian		2007	2008	2009	2010 <sup>*)</sup>	2011 <sup>**)</sup>
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	536.982	621.392	686.848	778.566	884.144
2.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu jiwa)	36.896	37.095	37.286	37.476	37.668
3.	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	14.554	16.751	18.421	20.772	23.460

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

*Keterangan: \*) Angka Diperbaiki*

*\*\*) Angka Sementa.*

Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan karena pertumbuhan PDRB ADHB jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin baik.

#### **4.2.4. PRODUKTIVITAS DAERAH SETIAP SEKTOR TAHUN 2007-2011**

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Jawa Timur, hendaknya juga dilihat dari sisi produktivitas sektor-sektor pendukungnya. Dari informasi itu akan diketahui seberapa jauh penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur dalam memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB.

Produktivitas sektor pertanian tahun 2007 mencapai Rp. 10,68 juta. sektor listrik, gas dan air masih tercatat memiliki produktivitas tertinggi yaitu

sebesar Rp. 375,10 juta, diikuti sektor lembaga keuangan sebesar 132,20 juta, sektor pertambangan dan penggalan sebesar Rp. 93,37 juta, sektor industri sebesar Rp. 62,79 juta, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 40,54 juta, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 33,01 juta, sektor jasa-jasa sebesar Rp. 23,29 juta dan sektor konstruksi sebesar Rp. 22,09 juta.

Di tahun 2007 sektor pertanian mengalami peningkatan produktivitas sebesar 5,32 persen, atau menjadi Rp. 10,68 juta, sedangkan sektor lainnya rata-rata meningkat di atas 8 persen, kecuali sektor konstruksi dan sektor pengangkutan dan komunikasi hanya mengalami peningkatan sebesar 3,37 persen dan 4,82 persen. Sektor listrik, gas dan air memiliki peringkat produktivitas tertinggi yang meningkat cukup besar yaitu 80,53 persen.

Sejalan dengan meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, tahun 2008 produktivitas sektor pertanian meningkat sebesar 16,79 persen, atau menjadi sebesar Rp. 12,47 juta. Namun demikian posisi produktivitas sektor pertanian masih yang terendah karena sektor lain juga mengalami peningkatan cukup tinggi. Sektor listrik, gas dan air, dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit mempunyai produktivitas yang cukup tinggi sebesar Rp. 457,38 juta. Sektor lainnya seperti sektor industri, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata juga masih tumbuh sebesar 16,81 persen, 13,15 persen, dan 15,65 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan dan sektor jasa-jasa rata-rata produktivitasnya meningkat dibawah 8 persen.

Pada tahun 2009, sebagian besar sektor mengalami peningkatan produktivitas, kecuali sektor listrik, gas dan air mengalami kontraksi sebesar - 20,99 persen. Penurunan ini diduga karena produksi dan harga per kwh listrik selama tahun 2009 berjalan stagnan, sementara jumlah tenaga kerja yang terserap masih terus bertambah. Namun demikian produktivitas sektor listrik,

gas dan air masih yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 361,38 juta. Sektor lainnya rata-rata masih mengalami peningkatan produktivitas, seperti sektor pertambangan dan penggalian meningkat sebesar 14,90 persen, sektor industri pengolahan meningkat sebesar 10,45 persen, sektor konstruksi 13,16 persen, sektor keuangan 18,46 persen dan sektor pertanian masih meningkat sebesar 8,58 persen. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi hanya mengalami peningkatan sebesar 7,49 persen dan sektor jasa-jasa hanya meningkat sebesar 4,74 persen.

**Tabel 4.171**

**Produktivitas Daerah Setiap Sektor Tahun 2007-2011(Juta Rupiah)**

Uraian		2007	2008	2009	2010 <sup>*)</sup>	2011 <sup>**)</sup>
1.	Pertanian	10,68	12,47	13,54	15,44	18,78
2.	Pertambangan dan Penggalian	93,37	93,46	107,39	127,20	135,76
3.	Industri Pengolahan	62,79	73,34	81,01	86,21	90,17
4.	Listrik, Gas, dan Air	375,10	457,38	361,38	458,55	424,59
5.	Konstruksi	22,09	25,00	28,29	39,11	39,79
6.	Perdagangan dan Akomodasi	40,54	46,88	49,63	60,56	68,29
7.	Transportasi dan Komunikasi	33,01	35,37	38,02	56,84	54,96
8.	Lembaga Keuangan	132,20	132,42	156,86	164,03	172,70
9.	Jasa-Jasa	23,29	25,13	26,32	27,63	30,50

sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : <sup>\*)</sup> Angka Diperbaiki

<sup>\*\*)</sup> Angka Sementara.

Pada tahun 2010, sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami peningkatan produktivitas terbesar, yaitu 49,52 persen atau menjadi Rp. 56,84 juta, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 38,27 persen. Sementara itu, produktivitas sektor listrik, gas dan air bersih yang sempat berkontraksi pada tahun 2009, kembali meningkat pada tahun 2010 yaitu sebesar 26,89 persen. Pada periode yang sama, sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalian masing-masing meningkat 14,05 persen dan 18,22 persen. Adapun sektor industri pengolahan, sektor lembaga keuangan dan sektor

Jasa-jasa produktivitasnya masing-masing meningkat sebesar 6,42 persen; 4,57 persen; dan 4,99 persen.

Pada tahun 2011, peningkatan produktivitas tertinggi terjadi pada sektor pertanian, yaitu dari Rp. 15,44 juta pada tahun 2010 menjadi Rp. 18,78 juta pada tahun 2011 atau meningkat 21,62 persen. Sedangkan yang mengalami kontraksi adalah sektor listrik, Gas & air dan sektor transportasi & Komunikasi masing-masing sebesar -7,41 persen dan -3,32 persen.

#### 4.2.5. PEMERATAAN PENDAPATAN VERSI BANK DUNIA TAHUN 2007-2011.

Meskipun suatu wilayah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik, perlu diketahui seberapa besar kue ekonomi yang terbentuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Bisa jadi kue ekonomi tersebut hanya dimiliki oleh konglomerat-konglomerat yang jumlahnya hanya segelintir orang saja. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen ke bawah,

**Tabel 4.172**  
**Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk**  
**Jawa Timur Tahun 2007-2011**

<b>Tahun</b>	<b>40 % bawah</b>	<b>40 % menengah</b>	<b>20 % atas</b>
2007	19,83	36,70	43,47
2008	19,92	36,86	43,22
2009	19,86	37,59	42,55
2010	20,81	38,52	40,67
2011*	21,09	38,57	40,34

*Keterangan: \*) Angka Sementara*  
*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur*

40 persen menengah dan 20 persen ke atas. Jika yang distribusi pengeluaran penduduk berkategori 40 persen ke bawah adalah kurang dari 17 persen, maka wilayah itu dikatakan mempunyai ketimpasan pemerataan pendapatan yang tinggi, artinya kue ekonomi dalam wilayah itu tidak banyak dinikmati oleh masyarakat berpendapatan 40 persen ke bawah.

Dari pengukuran pemerataan pendapatan berdasarkan versi Bank Dunia ini, penduduk Jawa Timur yang mempunyai pendapatan berkategori 20

persen ke atas pada tahun 2007 dapat menikmati kue ekonomi sebanyak 43,47 persen, dan selanjutnya mengecil masing-masing 43,22 persen (2008); 42,55 persen (2009) dan pada tahun 2010 menjadi 40,67 persen. Sementara kelompok yang berpendapatan 40 persen menengah dan 40 persen ke bawah cenderung semakin banyak yang dapat menikmati kue pembangunan. Dengan demikian kesenjangan semakin menurun, dan semakin dirasakannya kue ekonomi di tingkat pendapatan yang menengah ke bawah.

Pada penghitungan pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia ini, penduduk yang berpendapatan 40 persen ke bawah menjadi fokus penting untuk evaluasi ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah. Hasil penghitungan di Jawa Timur menunjukkan bahwa penduduk yang berpendapatan 40 persen ke bawah ternyata semakin dapat menikmati kue ekonomi dari 19,83 persen pada tahun 2007 menjadi 19,92 persen di 2008. Selanjutnya pada tahun 2009 meningkat menjadi 19,86 persen, pada tahun 2010 meningkat kembali menjadi 20,81 persen dan meningkat tipis pada tahun 2011 menjadi 21,09 persen. Berdasarkan skala kesenjangan yang telah ditetapkan, karena penduduk yang berpendapatan 40 persen ke bawah menikmati hasil kegiatan ekonomi di atas nilai 17 persen, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi selama kurun waktu 2007-2011 itu termasuk kategori ketimpangan pendapatan rendah.

#### **4.2.6. PERSENTASE KONSUMSI RT NON PANGAN JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011**

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan dasar manusia terhadap barang dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan makanan pada batas tertentu akan mencapai titik maksimal, sedangkan kebutuhan non makanan tidak terbatas.

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk makanan semakin menurun, sedangkan pengeluaran untuk non makanan akan terjadi sebaliknya yaitu proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/Engel law).

**Tabel 4.173**  
**Persentase Pengeluaran Rumahtangga**  
**Dirinci Menurut Pengeluaran Makanan & Non Makanan**  
**Jawa Timur Tahun 2007-2011**

Tahun	Persentase		
	Makanan	Non Makanan	Total
2007	56,17	43,83	100,00
2008	48,36	51,64	100,00
2009	52,73	47,27	100,00
2010	54,78	45,22	100,00
2011	56,68	43,32	100,00

*Sumber : Hasil Susenas 2007-2011 (diolah)*

proporsi pengeluaran non makanan pada tahun 2011 sebesar 43,32 persen, lebih rendah 1,90 persen dibanding tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata pengeluaran penduduk Jawa Timur untuk kebutuhan non makanan proporsinya relatif statis yaitu sekitar 46 persen, sedangkan proporsi kebutuhan makanan sekitar 54 persen. Keadaan ini merupakan salah satu indikasi bahwa meskipun secara umum tingkat pendapatan semakin meningkat, namun pada kenyataannya belum mampu meningkatkan derajat kesejahteraan penduduk. Hal ini mungkin dikarenakan makin tingginya perubahan harga yang tidak sebanding dengan perkembangan pendapatan. Kondisi ini tercermin dari pola konsumsi penduduk yaitu lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

#### 4.2.7. INDEKS GINI RATIO TAHUN 2010-2011

Berdasarkan nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2009-2011 masuk dalam kategori rendah (kurang dari 0,36). Namun demikian selama 2009-2011, nilai gini rasio di Jawa Timur terus mengalami kenaikan, dari 0,29 di tahun 2009, menjadi 0,31 pada tahun 2010 dan di tahun 2011 meningkat menjadi 0,34. Kondisi ini seperti terlihat pada kurva Lorenz (**Gambar 31**) tahun 2009-2011, kurva tahun 2011 memiliki luas area yang paling lebih besar dibanding dengan luas area tahun 2009 dan 2010 (kurva terhadap garis diagonal) atau menunjukkan bahwa kurva 2009-2011 bergerak semakin menjauhi garis pemerataan sempurna.

**Tabel 4.174**  
**Persentase Total Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan**  
**menurut Status Wilayah dan Kuintil Penduduk**  
**di Jawa Timur 2009-2011**

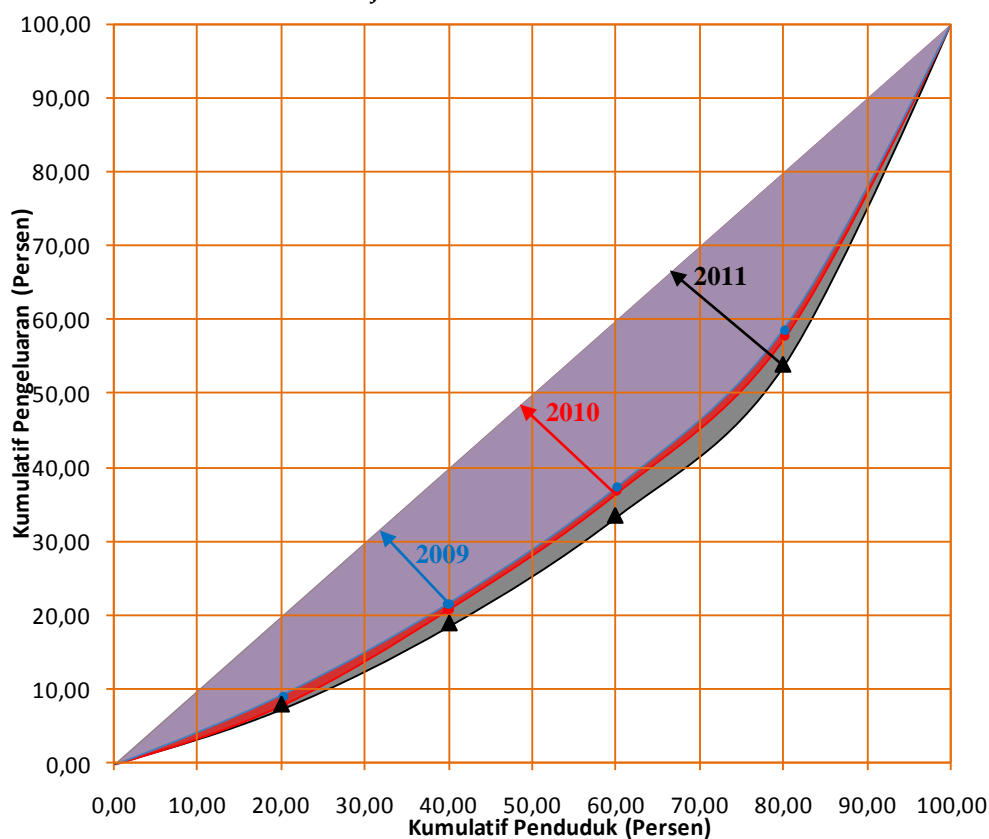
Tahun/ Wilayah (Kota/Desa)		Kuintil Penduduk berdasarkan Konsumsi					Gini Rasio
		1	2	3	4	5	
2009	Kota	7,98	12,13	15,76	21,46	42,68	0,31
	Desa	9,38	14,20	17,99	21,65	36,78	0,25
	Kota+ Desa	8,18	12,73	15,94	21,04	42,13	0,29
2010	Kota	8,57	12,12	15,65	21,03	42,62	0,31
	Desa	10,97	14,63	17,69	21,71	35,01	0,23
	Kota+ Desa	9,09	12,55	15,95	21,13	41,28	0,31
2011	Kota	7,44	10,62	14,45	20,69	46,80	0,36
	Desa	9,56	12,75	16,18	21,48	40,03	0,28
	Kota+ Desa	7,91	11,05	14,62	20,41	46,00	0,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2011 Angka Sementara hasil Susenas Triwulan 1 2011

Dengan demikian, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita selama 2009-2011 serta peningkatan persentase konsumsi non makanan, walaupun berada di atas tingkat kenaikan harga (inflasi), justru menyebabkan meningkatnya ketimpangan dalam distribusi konsumsi. Pergeseran selama 2009-2011 ini terjadi karena semakin berkurangnya share di kuintil satu sampai empat,

sedangkan kuintil lima mengalami peningkatan pada tahun 2011 terhadap kondisi di tahun 2009.

**Gambar 31**  
**Kurva Lorenz Kumulatif Penduduk dan Pengeluaran (Persen) di**  
**Jawa Timur 2009-2011**

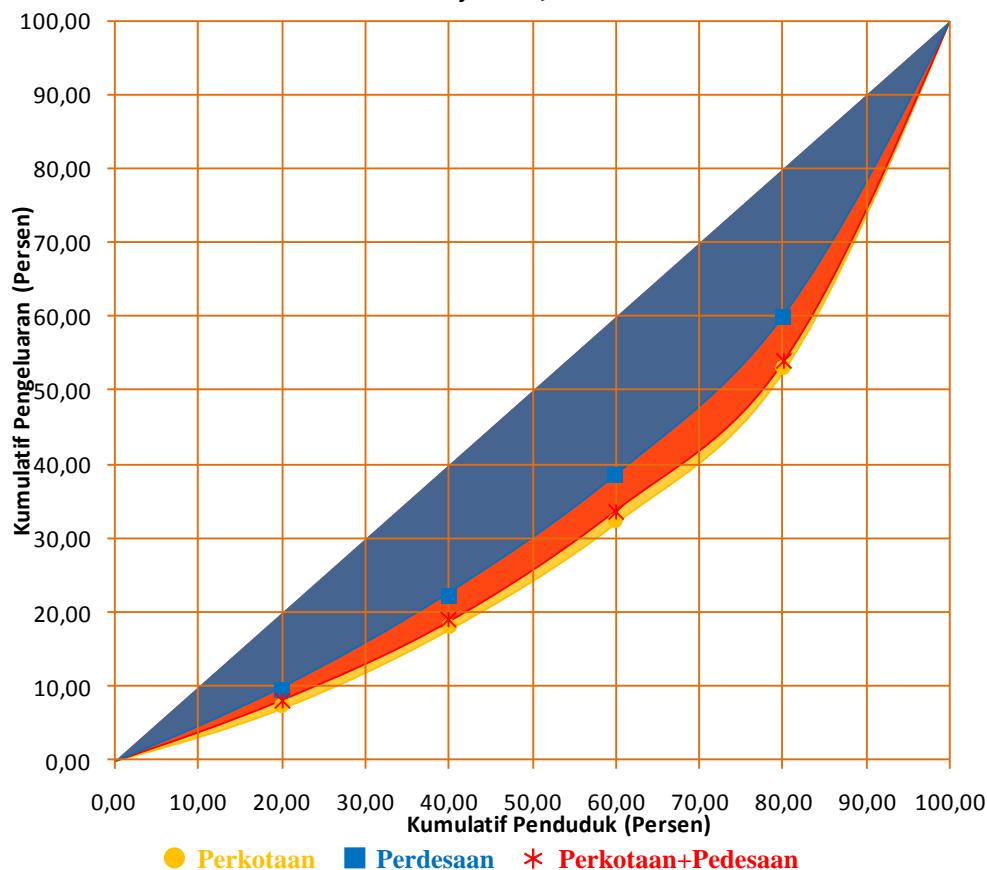


Peningkatan ketimpangan di tahun 2011 ini terutama terjadi di wilayah perkotaan yang tercermin dari nilai gini rasio sebesar 0,36 dan masuk dalam kriteria ketimpangan sedang, padahal di tahun 2010 wilayah perkotaan masih berada dalam kriteria ketimpangan rendah. Bahkan 40 persen penduduk pada kelas terbawah konsumsi per kapita sebulan, hanya menikmati kurang dari 20 persen total konsumsi. Untuk wilayah perdesaan, walaupun juga mengalami peningkatan nilai gini rasio menjadi 0,28 di tahun 2011 dari 0,23 di tahun 2010, namun nilai tersebut masih berada dalam kriteria ketimpangan rendah. Nilai gini rasio pada wilayah perkotaan dan perdesaan, memiliki beda sebesar 0,08 poin di tahun 2010 dan 2011, lebih tinggi dibandingkan tahun 2009, yang memiliki beda wilayah perkotaan dan perdesaan sebesar 0,06



poin. Ini menjadi indikasi bahwa wilayah perdesaan memiliki kecenderungan lebih cepat menuju tingkat pemerataan sempurna (lihat Gambar 32).

**Gamba 32.**  
**Kurva Lorenz Kumulatif Penduduk dan Pengeluaran (Persen)**  
**menurut Wilayah di Jawa Timur 2011**

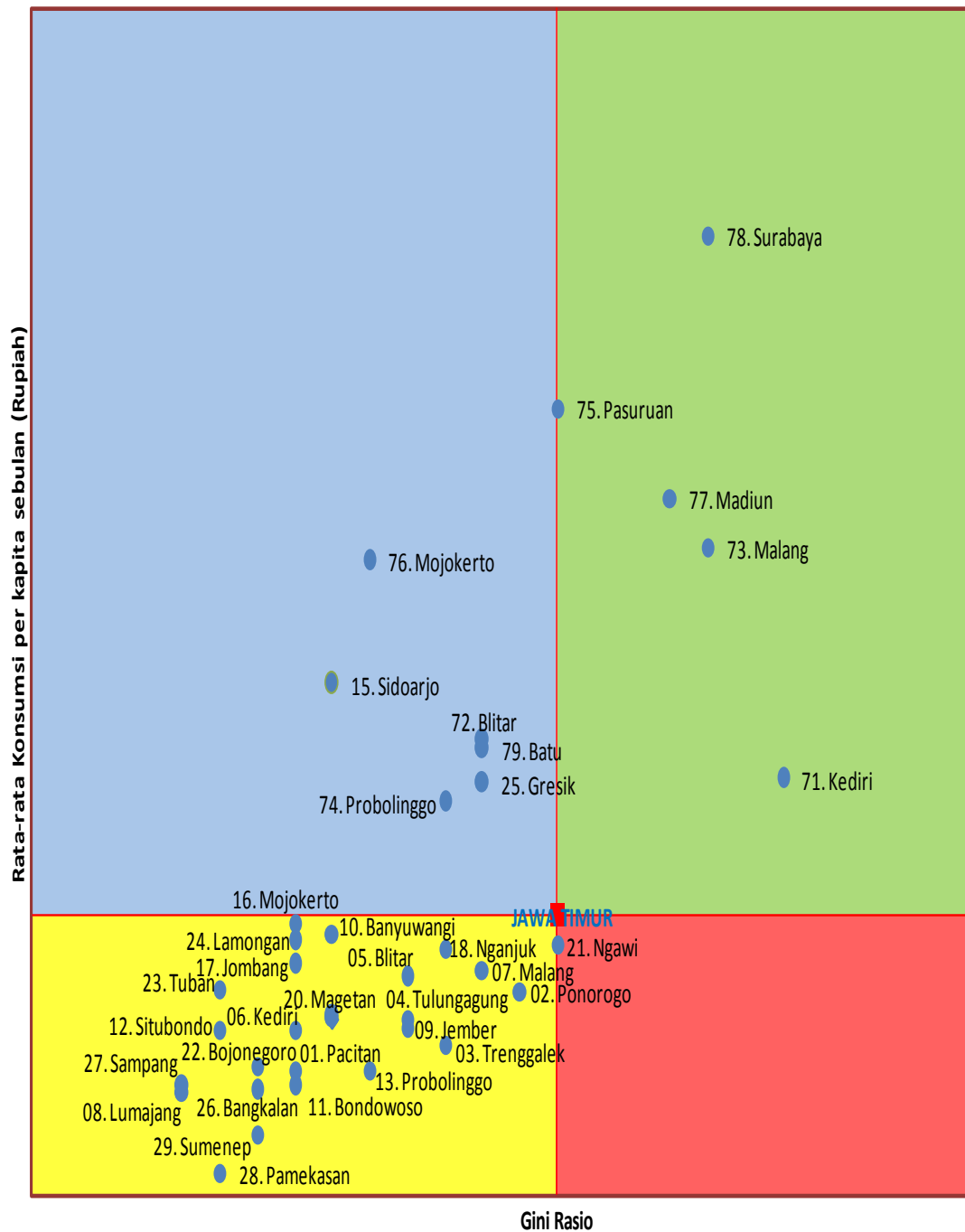


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Bila rata-rata konsumsi per kapita sebulan dan gini rasio Provinsi Jawa Timur tahun 2011, dijadikan sebagai acuan capaian wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur, maka akan diperoleh empat kelompok. Seperti terlihat dalam gambar 33, kelompok yang ideal adalah kabupaten/kota pada area wilayah biru (Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Batu, Kab. Gresik, dan Kota Probolinggo) merupakan wilayah dengan tingkat konsumsi per kapita yang tinggi dengan tingkat ketimpangan yang rendah dibandingkan kondisi provinsi. Sementara wilayah pada area hijau, yang meliputi Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Malang, dan Kota Kediri, merupakan wilayah dengan rata-rata konsumsi perkapita sebulan yang tinggi, namun

memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi juga. Sedangkan kabupaten/kota lainnya, berada di kelompok wilayah dengan rata-rata konsumsi perkapita serta tingkat ketimpangan yang rendah.

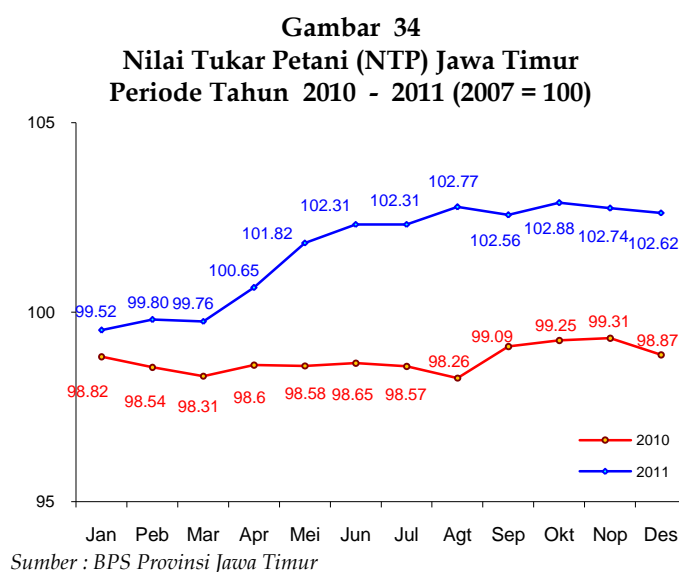
**Gambar 33.**  
Sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur menurut Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan (rupiah) dan Nilai Gini Rasio 2011



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 4.2.8. NILAI TUKAR PETANI (NTP) JAWA TIMUR TAHUN 2011

Rata-rata NTP Jawa Timur tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 2,94 persen dibanding data tahun 2010 yaitu dari 98,74 menjadi 101,65. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (8,99 persen) lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (5,86 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2011, secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2010.



**Gambar 34** menunjukkan bahwa selama tahun 2010, NTP Jawa Timur dari bulan Januari sampai dengan Desember lebih tinggi dibanding dengan bulan yang sama tahun 2010. Jika dilihat besarnya perubahan, kenaikan

NTP terbesar terjadi pada bulan Mei sebesar 1,17 persen karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 1,37 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani hanya naik sebesar 0,20 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi pada bulan September sebesar 0,20 persen karena indeks yang diterima petani naik sebesar 0,17 persen sedangkan indeks yang dibayar petani naik 0,38 persen.

**Tabel 4.175**  
**Rata-rata Indeks Harga Yang Diterima Petani ( $I_t$ ), Indeks Harga Yang Dibayar**  
**Petani ( $I_b$ ) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Tahun 2007 – 2011**  
**(2007 = 100)**

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ )	100,00	113,08	118,88	127,78	139,26
2	Indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ )	100,00	112,57	121,04	129,40	136,99
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,00	100,47	98,19	98,74	101,65

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Jika dilihat NTP masing-masing sub sektor pada tahun 2010, NTP tertinggi terjadi pada sub sektor hortikultura sebesar 111,03, sedangkan NTP terendah terjadi pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 97,59. Kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor tanaman pangan sebesar 6,90 persen, yaitu dari 94,60 menjadi 101,13 sedangkan penurunan terbesar terjadi pada sub sektor peternakan sebesar 5,63 persen, yaitu dari 103,43 menjadi 97,61.

**Tabel 4.176**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Tahun 2007 – 2011**  
**(2007 = 100)**

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	NTP Jawa Timur	100,00	100,47	98,19	98,74	101,65
2	NTP Tanaman Pangan	100,00	98,98	92,56	94,60	101,13
3	NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	110,42	100,31	92,51	97,59
4	NTP Peternakan	100,00	101,22	106,90	103,43	97,61
5	NTP Perikanan	100,00	101,96	101,07	101,75	101,54
6	NTP Tanaman Hortikultura	100,00	98,68	106,46	110,60	111,03

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

### a. Indeks Diterima Petani

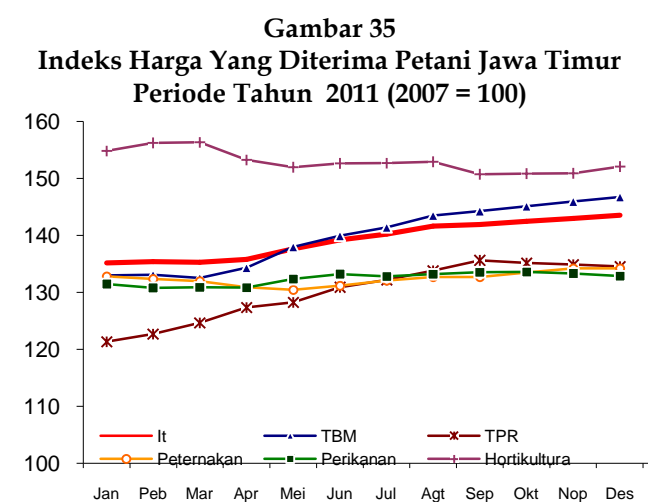
Rata-rata indeks harga yang diterima petani pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 8,99 persen dari 127,78 menjadi 139,26. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada empat sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan naik 13,53 persen dari 123,14 menjadi 139,79, perkebunan rakyat naik 9,15 persen dari 119,20 menjadi 130,10, perikanan naik 4,68 persen dari 126,47 menjadi 132,39, tanaman hortikultura naik 16,21 persen dari 131,60 menjadi 152,93. Sementara itu sub sektor peternakan turun 0,72 persen dari 133,36 menjadi 132,40.

**Tabel 4.177**

**Rata-rata Indeks Harga Yang Diterima Petani Jawa Timur  
Menurut Sub Sektor Pertanian Tahun 2007 – 2010  
(2007 = 100)**

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Indeks harga diterima petani (It)	100,00	113,08	118,88	127,78	139,26
2	Tanaman Bahan Makanan	100,00	111,72	112,37	123,14	139,79
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	100,00	112,93	121,62	119,20	130,10
4	Peternakan	100,00	113,39	129,83	133,36	132,40
5	Perikanan	100,00	113,25	118,85	126,47	132,39
6	Tanaman Hortikultura	100,00	110,89	128,77	131,60	152,93

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar 35 menunjuk kan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2011 indeks harga yang diterima petani sub sektor hortikultura lebih tinggi dibanding sub sektor lainnya maupun indeks kompositnya. Indeks harga yang diterima petani tanaman bahan

makanan dan tanaman perkebunan rakyat mengalami kecenderungan meningkat selama tahun 2011 meskipun pada bulan tertentu terjadi penurunan. Indeks harga yang diterima sub sektor peternakan dan perikanan memiliki fluktuasi yang relatif lebih stabil dibanding sub sektor lain sedangkan indeks harga yang diterima petani sub sektor hortikultura mengalami fluktuasi harga yang lebih tajam dibanding sektor lainnya karena pengaruh faktor musiman dan iklim yang cukup dominan.

#### **b. Indeks Dibayar Petani**

Rata-rata Indeks harga yang dibayar petani tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 5,86 persen dibanding indeks tahun 2010 yaitu dari 129,40 menjadi 136,99. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya indeks harga kelompok konsumsi rumah tangga serta indeks biaya produksi dan pembentukan modal.

Rata-rata indeks harga kelompok konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 6,45 persen dari 131,67 pada tahun 2010 menjadi 139,69 pada tahun 2011. Kenaikan indeks kelompok ini disebabkan naiknya indeks harga sub kelompok bahan makanan sebesar 7,56 persen, makanan jadi naik 5,65 persen, perumahan naik 6,86 persen, sandang naik 7,70 persen, kesehatan naik 4,14 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 4,01 persen, serta transportasi dan komunikasi naik 1,36 persen.

Indeks biaya produksi mengalami kenaikan sebesar 3,94 persen dari 123,11 pada tahun 2010 menjadi 123,96 pada tahun 2011. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga bibit sebesar 4,01 persen, upah buruh tani naik 4,07 persen, sewa lahan, pajak dan lainnya naik 3,57 persen, obat-obatan dan pupuk naik 4,75 persen, penambahan barang modal naik 4,27 persen dan transportasi naik 2,68 persen.

**Tabel 4.178**  
**Rata-rata Indeks Dibayar Petani Jawa Timur**  
**Menurut Kelompok/Jenis Komoditi Tahun 2007 – 2010**  
**(2007 = 100)**

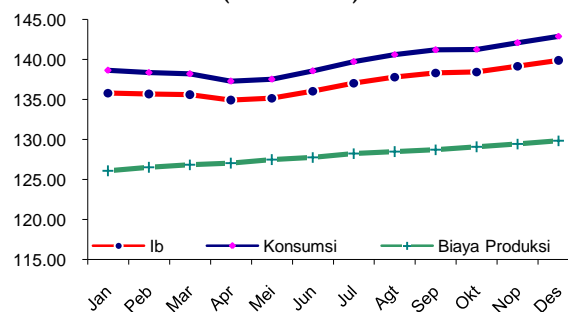
No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>Indeks harga dibayar petani (Ib)</b>		100,00	112,57	121,04	129,40	136,99
1	Konsumsi Rumahtangga	100,00	112,90	121,67	131,22	139,69
	- Bahan Makanan	100,00	116,53	125,60	137,53	147,93
	- Makanan Jadi	100,00	106,78	118,84	129,33	136,64
	- Perumahan	100,00	112,06	121,84	131,31	140,32
	- Pakaian	100,00	109,82	120,39	128,09	137,95
	- Kesehatan	100,00	108,87	116,32	120,54	125,54
	- Pendidikan	100,00	106,78	117,60	121,26	126,12
	- Transportasi	100,00	113,89	110,72	111,12	112,74
2	Biaya Produksi	100,00	111,15	118,72	123,11	127,96
	- Bibit	100,00	117,46	130,57	136,05	141,50
	- Obat-obatan dan Pupuk	100,00	107,25	113,75	117,90	123,50
	- Sewa, Pajak dan lainnya	100,00	110,07	118,08	122,76	127,14
	- Transportasi	100,00	116,02	118,20	121,27	124,52
	- Penanaman                      Barang					
	Modal	100,00	112,10	121,04	125,31	130,66
	- Upah Buruh Tani	100,00	111,05	117,78	122,52	127,51

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

**Gambar 36**

menunjukkan Indeks yang dibayar petani selama periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011. Indeks biaya konsumsi rumah tangga

**Gambar 36**  
**Indeks Dibayar Petani Jawa Timur Tahun 2011**  
**(2007 = 100)**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

selalu lebih tinggi dibanding indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal. Indeks konsumsi rumah tangga berfluktuasi sepanjang tahun sedangkan indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal mengalami kenaikan sepanjang tahun.

#### **4.2.9. NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) JAWA TIMUR TAHUN 2011**

Nilai Tukar Nelayan selama tahun 2011 berada pada level di atas 100, ini menunjukkan bahwa perkembangan harga ikan segar yang dihasilkan nelayan masih lebih tinggi dari pada perkembangan harga kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya produksi. Seharusnya dengan tingkat perkembangan harga ikan yang lebih baik dari pada harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga nelayan, dapat memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraannya, namun biasanya harga ikan yang tinggi cenderung berkaitan dengan tingkat produksinya yang rendah. Kendala cuaca biasanya merupakan faktor kunci nelayan tak bisa melaut pada bulan-bulan tertentu, sehingga nelayan masih belum mampu menghasilkan ikan segar dengan kuantitas yang stabil. Hal ini disebabkan sebagian besar nelayan masih bersifat tradisional dengan peralatan tangkap yang sangat sederhana. Dengan peralatan yang sederhana maka selain rentan terhadap cuaca juga daya jangkauan di lautan tidak akan terlalu jauh.

Selama tahun 2011, perkembangan harga yang diterima nelayan lebih tinggi dari pada perkembangan harga yang dibayar nelayan atau dengan kata lain perkembangan harga ikan segar yang dihasilkan nelayan masih cenderung lebih tinggi dari pada perkembangan harga kebutuhan hidup sehari-hari. Secara teori, dengan perkembangan harga yang tinggi, maka diharapkan nelayan dapat meraup lebih banyak pendapatan. Namun yang terjadi adalah perkembangan harga yang sangat tinggi hanya dinikmati oleh sebagian kecil nelayan saja terutama yang memiliki armada dan alat penangkapan yang lebih baik dan lebih modern. Namun bagi nelayan tradisional, kenaikan harga tidak bisa mereka nikmati karena terbatasnya kapasitas barang modal mereka yang rentan terhadap pengaruh cuaca.

Perkembangan NTN selama empat tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan 2011 cenderung meningkat. Rata-rata NTN tahun 2011

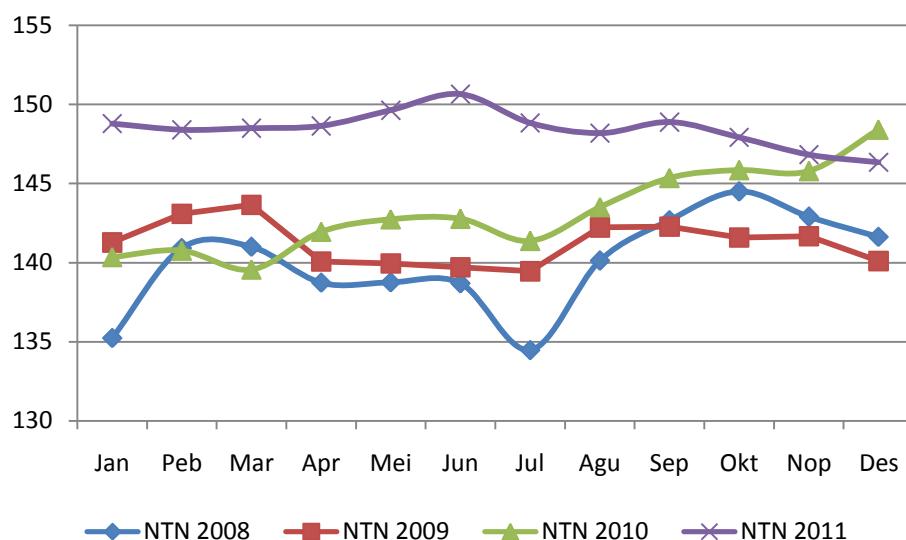


sebesar 148,46 atau meningkat 3,67 persen dibanding dengan NTN tahun 2010 sebesar 143,20. Kenaikan NTN tahun 2011 disebabkan karena kenaikan indeks yang diterima nelayan 9,95 persen lebih besar dibanding dengan kenaikan indeks yang dibayar nelayan 6,08 persen. Kenaikan indeks yang diterima nelayan tahun 2011 diduga karena pengaruh kondisi cuaca yang lebih buruk selama tahun 2011 dibandingkan dengan kondisi cuaca tahun-tahun sebelumnya. Nelayan pada umumnya tidak melaut bila cuaca buruk, karena membahayakan untuk keselamatannya, sehingga jumlah produksi ikan menjadi lebih sedikit akibatnya harga ikan menjadi lebih mahal. Mahalnya harga ikan dibanding dengan periode sebelumnya menjadikan perkembangan indeks menjadi lebih tinggi.

Perkembangan NTN selama tahun 2011, pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni cenderung meningkat dari 148,79 pada bulan Januari menjadi 150,65 pada bulan Juni, kecuali pada bulan April mengalami sedikit penurunan. Sementara pada bulan Juli sampai bulan Desember cenderung mengalami penurunan dan NTN mencapai titik terendah pada Bulan Desember sebesar 146,34.

**Gambar 37**

**Perkembangan NTN Jawa Timur Tahun 2008-2011**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 37, menunjukkan NTN selama tahun 2011 lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan indeks ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks yang diterima nelayan lebih tinggi dibanding indeks yang dibayar nelayan. Hal ini karena pengaruh kondisi cuaca yang tidak menentu, musim penghujan dan musim angin yang panjang menyebabkan banyak nelayan yang jarang melaut, sehingga kelangkaan ikan di pasaran mengakibatkan mahalnya harga ikan.

Perbedaan situasi dan kondisi perekonomian yang jauh berbeda selama periode satu tahun menjadi penyebab yang lain dari tingginya indeks harga yang diterima oleh nelayan. Kenaikan yang tinggi dari indeks harga yang diterima nelayan tersebut tidak langsung menjadikan kesejahteraan nelayan menjadi lebih baik. Kondisi ini hanya sebagai dampak dari tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh nelayan selama melaut. Komponen biaya yang paling besar adalah pengeluaran untuk bahan bakar minyak (BBM).

Meskipun ada kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk meringankan pengeluaran biaya nelayan, tidak menjadikan NTN pada tahun 2011 bergerak stabil. Hal ini karena kebijakan penyesuaian harga BBM, juga diikuti oleh konversi bahan bakar minyak tanah yang menyebabkan minyak tanah sulit dicari di pasaran sehingga harganya sangat tinggi, padahal minyak tanah ini dimanfaatkan untuk campuran BBM untuk kapal motor nelayan. Hal ini memberikan pengaruh terhadap biaya produksi dan untuk menyiasati kondisi yang demikian beberapa nelayan biasanya membentuk kelompok untuk melaut. Masing-masing kelompok memberikan informasi tentang posisi ikan pada kelompok yang lainnya. Dengan demikian terjadi efisiensi biaya, karena nelayan tidak harus mencari posisi keberadaan ikan di laut, karena sudah mengetahui posisi ikan dan hanya tinggal menangkap ikan saja.

**Tabel 4.179**  
**Indeks Harga Yang Diterima Dan Yang Dibayar Nelayan**  
**Serta Nilai Tukar Nelayan Di 6 (Enam) Kabupaten Di Jawa Timur**  
**Tahun 2011 ( 2005 = 100 )**

KELOMPOK DAN		Bulan											
SUB KELOMPOK		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	INDEKS HARGA YANG DITERIMA NELAYAN	212.62	213.29	213.50	213.25	215.23	217.47	216.64	217.09	218.73	218.11	217.33	217.30
II.	INDEKS HARGA YANG DIBAYAR NELAYAN	142.90	143.73	143.78	143.47	143.85	144.36	145.57	146.51	146.92	147.46	148.03	148.50
A.	INDEKS KONSUMSI RUMAHTANGGA	155.10	156.03	155.38	154.43	155.23	155.60	157.63	158.49	159.80	160.56	161.65	162.98
	1. Makanan	205.81	209.35	204.19	194.57	195.59	196.63	199.71	201.21	202.02	202.51	204.73	208.42
	2. Mak & Min. Jadi, Rokok & Tembakau	146.74	146.83	147.91	148.97	148.84	150.39	153.20	153.83	154.72	156.49	157.45	158.80
	3. Perumahan	157.74	158.55	159.16	160.26	161.26	161.60	161.94	163.18	163.43	164.47	165.06	166.20
	4. Sandang	152.87	152.80	152.63	154.56	156.51	156.31	159.52	161.25	163.94	164.81	166.68	166.78
	5. Kesehatan	135.96	137.05	137.77	137.82	137.84	137.90	139.49	139.66	139.88	140.84	142.18	142.40
	6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	106.56	106.47	106.56	106.88	107.19	107.23	109.39	110.04	110.42	110.46	110.41	110.66
	7. Transportasi dan Komunikasi	148.17	148.21	148.35	148.36	148.36	148.40	151.36	151.70	151.72	151.80	151.87	152.90
B.	INDEKS BIAYA PRODUKSI	134.74	135.61	136.03	136.14	136.25	136.82	137.34	138.40	138.23	138.59	138.81	138.84
	1. Barang Modal	122.59	123.79	124.05	123.95	124.21	124.74	125.75	126.29	126.32	126.01	126.25	126.60
	2. Biaya Buruh	131.86	131.93	132.07	132.12	132.12	132.37	132.87	134.49	135.01	135.01	135.40	135.15
	3. Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	158.17	159.31	158.53	158.80	158.91	160.14	160.25	160.54	160.12	161.24	161.53	161.62
III.	NILAI TUKAR NELAYAN	148.79	148.39	148.49	148.63	149.62	150.65	148.82	148.17	148.87	147.91	146.82	146.34

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Naiknya perkembangan NTN selama tahun 2010, juga disebabkan karena kondisi musim yang kurang baik, angin kencang dan gelombang tinggi. Dengan kondisi seperti ini berarti banyak nelayan yang mengurangi frekuensinya untuk melaut, akibatnya persediaan ikan di pasaran sudah pasti berkurang cukup banyak dan juga harga ikan akan mengalami kenaikan. Dengan demikian indeks harga yang diterima selalu berkembang di atas 100. Selain itu indeks harga yang dibayar nelayan perkembangannya lebih kecil dari perkembangan harga ikan laut. Kenaikan indeks harga yang dibayar oleh nelayan sangat dipengaruhi oleh kenaikan dari indeks konsumsi makanan, sedangkan perkembangan harga non makanan dan biaya produksi cenderung tetap.

Pada tahun mendatang kesejahteraan nelayan juga masih belum memiliki prospek yang bagus bila dikaitkan dengan 2 macam krisis yang pasti terjadi, yaitu faktor cuaca ekstrim sebagai dampak dari pemanasan global dan krisis sumber daya perikanan sebagai akibat rusaknya terumbu karang dan migrasi ikan yang berlebihan keluar daerah tangkapan. Selain itu faktor penyebab internal juga menjadikan posisi nelayan lokal semakin lemah, yaitu rendahnya tingkat teknologi penangkapan, kecilnya skala usaha, belum efisiennya sistem pemasaran hasil ikan dan status nelayan yang sebagian besar adalah buruh. Jika demikian, diperlukan strategi kebijakan pembangunan yang efektif, yang mengacu pada sistem agribisnis yang komprehensif dan terpadu.

Potensi perikanan tangkap di Jawa Timur amat besar, karena sebagian besar wilayahnya mulai ujung barat hingga ujung timur berbatasan dengan laut. Pengelolaan agribisnis perikanan perlu ditingkatkan dari hulu hingga hilir. Misi pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang "Pro Job" sebagian akan terwujud melalui pengelolaan agribisnis terpadu pada sektor perikanan, misalnya pengawetan ikan, pengolahan tepung ikan, pengolahan produk hasil-hasil dari perikanan lainnya. Aksi pemerintah meluncurkan program

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terpadu perlu mendapat dukungan pemerintah daerah dan bukan hanya sektor tanaman pangan saja, tetapi perlu dikembangkan hingga mencapai kampung nelayan. Pengawasan terhadap program tersebut perlu dilakukan, sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi di kampung nelayan, yang pada akhirnya mampu menggerakkan roda ekonomi kampung nelayan yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Namun demikian bila diamati perkembangan NTN setiap bulannya masih fluktuatif sepanjang tahun, dan sangat dipengaruhi oleh musim/cuaca, ini memberikan indikasi belum intensifnya pengelolaan pasca panen produk perikanan, karena harga ikan justru lebih murah ketika musim panen tiba. Pengembangan agribisnis perikanan masih sangat diperlukan, demi terjaganya stabilitas harga ikan. Selain itu peningkatan kualitas hasil tangkapan juga perlu mendapat perhatian, sehingga ikan masih dalam keadaan segar dan utuh ketika sampai ditangan konsumen.

Strategi Pemerintah Jawa Timur untuk melestarikan dan meningkatkan Usaha Nelayan melalui beberapa cara yaitu:

- Stimulan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan untuk 17 kabupaten/kota, pengembangan Sarana Prasarana PPP/PPI di PPP Muncar, PPP Mayangan, PPP Tamperan, PPP Pondokdadap, PPI Bulu dan Pasongsongan,
- fasilitasi Palkanisasi kapal dan penerapan sistem rantai dingin di delapan pelabuhan perikanan,
- adanya upaya peningkatan tingkat konsumsi ikan melalui kampanye GEMARIKAN di kabupaten/kota,
- kemudahan ekspor telah difasilitasi melalui layanan health certificate secara Online, layanan Perijinan Satu Tempat (PESAT) untuk pelayanan health certificate dan catch certifate.

- pelestarian Sumber Daya Ikan telah dilakukan restocking di perairan Umum Daratan (PUD) sebanyak 3.500.000 ekor, restocking di laut sebanyak 1.102.000 ekor, rehabilitasi mangrove seluas 214 Ha di Kabupaten/Kota dan terumbu karang seluas 118.000 ha di lima kabupaten.

Selain itu, pernah ada program pusat dalam rangka untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan melalui Program Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Namun di lapangan nampaknya program ini kurang mendapat pengawalan dengan baik. Masyarakat nelayan dan pesisir memang memerlukan perhatian menyeluruh karena keterbatasan sumber daya manusia serta permodalan, LEPP M3 yang dikelola profesional diharapkan mampu memberi semangat baru untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir.

Program pemerintah Jawa Timur yaitu GEMARIKAN sangat tepat untuk mensosialisasikan bahwa budaya makan ikan selain sangat baik untuk kesehatan, juga mampu menghemat devisa negara. Selama ini masyarakat selalu menganggap makan tahu tempe sebagai makanan yang murah dan mudah untuk dapat dikonsumsi, padahal pemerintah masih sangat bergantung pada kedelai impor. Belanja untuk impor tentunya akan menyerap devisa yang banyak, apalagi bila setiap penduduk mengkonsumsi tempe. Konsumsi lauk ikan merupakan produk lokal yang harus dibudayakan, namun sampai saat ini komoditas ikan masih dianggap mahal oleh sebagian masyarakat, sehingga enggan untuk membelinya. Seharusnya harga ikan dapat lebih murah seandainya pengelolaan Agribisnis Perikanan dapat berlangsung dengan baik.

#### 4.2.10. PERKEMBANGAN / C O R JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011

Suatu perusahaan bila produksinya ingin berjalan lancar, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian secara makro dengan membuat keputusan mengenai stok berdasarkan kondisi tersebut. Misalnya : melakukan penimbunan bahan baku dikarenakan adanya kenaikan harga bahan baku. Jika hal ini terjadi, maka perubahan

stok dapat dimasukkan sebagai komponen pembentukan modal (investasi). Sementara dalam pendekatan mikro, diasumsikan bahwa perusahaan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok baik untuk bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi untuk kelancaran produksi.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dari hasil penghitungan ICOR (tabel 4.13.) besaran ICOR yang dihasilkan tahun 2007 mencapai 3,04, sedangkan tahun 2008 sampai dengan 2010 masing-masing mencapai kisaran 3,03; 3,59 dan 3,30. Pada tahun 2011 sebesar 3,09. ICOR negara-negara sedang berkembang pada umumnya berkisar antara 2,0 sampai 5,0. Sementara 5 (lima) tahun terakhir ini ICOR Jawa Timur rata-rata per tahun sebesar 3,33. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan cukup efisien.

Angka ICOR Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 3,09, artinya bahwa untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 3,09 unit. Jika dibandingkan dengan besaran ICOR pada tahun

**Tabel 4.180**  
**ICOR Jawa Timur**  
**Tahun 2007-2011**

<b>Tahun</b>	<b>ICOR</b>
2007	3,04
2008	3,03
2009	3,59
2010*	3,30
2011**	3,09

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

sebelumnya yang mencapai 3,30, maka dapat dikatakan bahwa setiap penambahan 1 unit output memerlukan investasi sebesar kurang lebih 3,30 unit. Lebih jelasnya pernyataan di atas dapat diartikan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2010 diperlukan investasi sebesar 3,30 milyar rupiah. Sementara untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2011 diperlukan investasi sebesar 3,09 milyar rupiah. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa efisiensi permodalan 2011 relatif lebih baik dibanding tahun 2010. Diduga salah satu penyebab kondisi ini adalah semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

#### **4.2.11. PERKEMBANGAN INVESTASI PMA/PMDN DI JAWA TIMUR BERDASARKAN IZIN PRINSIP**

Perkembangan investasi di Jawa Timur berdasarkan terbitnya Surat Izin Prinsip pada tahun 2011 adalah sebanyak 289 Proyek PMA dan PMDN dengan total nilai investasi sebesar Rp. 70,91 Trilyun dan menyerap 87.918 Tenaga Kerja, meningkat 19% dibanding Tahun 2010 sebesar Rp. 59,46 Trilyun.

Minat Investasi PMA sebanyak 174 proyek dengan nilai investasi Rp. 44,68 Trilyun dan menyerap 58.789 Tenaga Kerja. PMA meningkat 142 % dibanding tahun 2010 sebesar Rp. 18,45 Trilyun, hal ini menunjukkan iklim investasi di Jawa Timur sangat kondusif, efisien dan profitable dengan ICOR : 3,2 sehingga Jawa Timur sangat menarik minat Investor Asing. Berdasarkan Negara asal investasi PMA terbesar dari Negara Singapura (Rp. 23,42 Trilyun), kedua Negara Inggris (Rp. 3,80 Trilyun), selanjutnya China (Rp. 2,25 Trilyun), Jepang (Rp. 1,81 Trilyun), Belanda (Rp. 1,22 Trilyun), Malaysia (Rp. 0,86 Trilyun) dan Korea Selatan (Rp. 0,51



Trilyun) dengan bidang usaha yang diminati PMA adalah Industri Makanan, Kendaraan Bermotor dan Alat Transport, Industri Kertas dan Percetakan, Industri Mineral Non Logam, Transport Gudang dan Komunikasi. Sedangkan lokasi investasi (PMA) pada Tahun 2011 yang paling diminati Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya dan Kabupaten Tuban.

Sedangkan minat Investasi PMDN sebanyak 115 Proyek dengan investasi sebesar Rp. 26,23 Trilyun yang menyerap 29.129 tenaga kerja.

Lokasi yang diminati PMDN terbesar di Kabupaten. Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten. Pasuruan dan Mojokerto dengan bidang usaha yang didominasi oleh Industri Makanan, Industri Kertas dan Percetakan, Industri Mineral Non Logam, Industri Karet dan plastik.

**Tabel 4.181**

**Realisasi Investasi Tahun 2011 Berdasarkan Izin Prinsip**

<b>JENIS INVESTASI</b>	<b>Jumlah Proyek (Proyek)</b>	<b>Nilai Investasi (Rp. Trilyun)</b>	<b>Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)</b>
PMA	174	44,68	58.789
PMDN	115	26,23	29.129
TOTAL	289	70,91	87.918

**Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan nilai Izin Prinsip pada Tahun 2011, terdapat 5 (lima) besar Minat Investasi PMA dan PMDN, antara lain sebagai berikut :

- Bidang Usaha adalah Industri Makanan, Industri Kendaraan Bermotor & Sparepart, Listrik, Gas dan Air, Industri Mineral Non Logam, dan Industri Kertas dan Percetakan.
- Lokasi Proyek adalah Kab. Gresik, Kab. Banyuwangi, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Probolinggo/Kab. Pasuruan.

- Negara Asal PMA adalah Singapura, Belanda, Inggris, China dan Korea Selatan/Jepang.
- Kebutuhan Tenaga Kerja terbanyak adalah Industri Makanan, Industri Kulit dan Alas Kaki, Industri Mineral Non Logam, Industri Logam, Mesin & Elektronik dan Industri Karet & Plastik.

#### 4.2.12. PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA) JAWA TIMUR TAHUN 2009-2011

Perkembangan investasi di Jawa Timur selama periode 2009 – 2011 telah berhasil meningkatkan jumlah realisasi investasi baik PMA maupun PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 sebanyak 183 proyek untuk PMDN dan 191 proyek untuk PMA dengan total investasi sebesar Rp 40,40 Trilyun atau meningkat 53 % dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 26,32 Trilyun.

Rekapitulasi kinerja penanaman modal di Jawa Timur pada Tahun 2009, 2010, 2011 berdasarkan LKPM dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.182**  
**REALISASI INVESTASI PMA/PMDN DI JAWA TIMUR**  
**TAHUN 2009-2011**

NO	TRIWULAN	2009			2010			2011		
		PMA	PMDN		PMA	PMDN		PMA	PMDN	
			Fasilitas	Non FAS		Fasilitas	Non FAS		Fasilitas	Non FAS
1	I	1,20	1,35	10,51	4,09	0,48	12,26	4,00	4,93	9,23
2	II	1,31	1,01	9,19	3,57	5,10	7,21	4,82	7,69	11,20
3	III	0,73	0,94	4,97	4,07	2,01	21,45	3,56	4,87	30,56
4	IV	0,56	0,99	14,15	5,00	2,00	15,34	7,69	2,84	19,08
TOTAL		3,80	4,29	38,82	16,73	9,59	56,26	20,07	20,33	70,07

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Sedangkan realisasi Investasi Daerah sejak tahun 2008 sebesar Rp.27,19 Trilyun terus meningkat menjadi Rp. 70,07 Trilyun dengan 64.690 unit usaha pada tahun 2011 atau meningkat 25 % dibandingkan tahun 2010 sebesar 56,26 Trilyun.

**Tabel 4.183**  
**Perkembangan Realisasi Investasi Daerah (Non PMA dan PMDN)**

TAHUN	UNIT USAHA	INVESTASI (Rp. Trilyun)	TENAGA KERJA (orang)
2008	66.057	27,19	446.759
2009	55.304	38,82	367.962
2010	73.016	56,26	285.517
2011	64.960	70,07	324.219
<b>Jumlah</b>	<b>259.337</b>	<b>192,34</b>	<b>1.424.457</b>

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Capaian penting lainnya adalah Kinerja pelayanan perijinan terpadu Badan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh UPT P2T Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2011 adalah terbitnya 28.525 surat izin dengan total nilai investasi sebesar Rp 20.53 Trilyun dan terciptanya lapangan kerja sebanyak 54.828 tenaga kerja.

Jumlah 28.525 surat ijin tersebut didominasi oleh perijinan sektor kesehatan dari 17 sektor SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 22.040 ijin, atau sebesar 77,27 % dari total jumlah ijin yang dikeluarkan.

Sektor Penanaman Modal berupa penerbitan Izin Prinsip PMDN meningkat dari 27 Izin Prinsip menjadi 140 Izin Prinsip pada tahun 2011 dengan nilai investasi dari Rp. 2,83 Trilyun menjadi 17,68 Trilyun pada tahun 2011

#### **4.2.13. PERKEMBANGAN JUMLAH PERDA YANG MENDUKUNG IKLIM USAHA JAWA TIMUR 2005-2011**

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah (Perda) disusun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Syarat utama berkembangnya investasi di daerah adalah adanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Hal ini bisa dicapai dengan tidak adanya ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh banyaknya Perda yang dilatari keinginan pemerintah daerah untuk menggali PAD sebesar-besarnya melalui Perda yang banyak memungut pajak dan retribusi.

Perda Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 yang mendukung iklim usaha telah diterbitkan sebanyak 1 buah yaitu Perda No 2 Tahun 2010 tentang tata kelola produk pertanian dan perikanan. Perda tersebut diterbitkan untuk mengatasi disparitas pendapatan petani dengan pedagang. Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 2 Perda yang mendukung iklim usaha yaitu Perda Provinsi Jawa Timur yang mendukung iklim usaha adalah Perda No 6 Tahun 2011 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan Perda No 8 tentang pelayanan publik.

Peraturan Daerah No 6 tahun 2011 diharapkan mampu memberikan trobosan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan Peraturan Daerah No 8 tahun 2011 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik di Jawa Timur; serta terwujudnya kepastian hukum tentang hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara itu perda yang disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota khususnya yang mendukung iklim usaha pada tahun 2010 sebesar 31,03 persen dari total perda yang telah disahkan oleh pemerintah kab/kota. Sementara itu pada tahun 2011 hanya 10,60 persen perda yang disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota khususnya yang mendukung iklim usaha. Penurunan persentase perda kabupaten/kota yang mendukung iklim investasi menunjukkan bahwa beberapa perda yang diterbitkan sebelumnya dianggap sudah mendukung iklim investasi sehingga tidak perlu diterbitkan perda baru.

#### 4.2.14. PERKEMBANGAN *I L O R* JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011

*Incremental Labour Output Ratio (ILOR)*, merupakan perbandingan antara penambahan jumlah tenaga kerja dengan penambahan besaran output. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan melihat besaran *ILOR*, dapat diketahui pengaruh dari perubahan nilai PDRB (ADHK) terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Dari hasil penghitungan tahun 2011 telah diketahui bahwa *ILOR* Jawa Timur sebesar 0,01 yang berarti setiap penambahan 100 juta rupiah PDRB diikuti oleh penambahan 1 (satu) orang tenaga kerja.

**Tabel 4.184**  
***ILOR* Jawa Timur Tahun 2007-2011**  
**(Tahun Dasar 2000)**

Tahun	<i>ILOR</i>	
	Per tahun	Rata-rata
2007	0,05	0,04
2008	0,01	0,02
2009	0,03	0,03
2010*)	-0,03	0,01
2011**)	0,01	0,01

Sumber : . BPS Provinsi Jawa Timur.

Keterangan : \*) Angka Diperbaiki

\*\*) Angka Sementara

Dari tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir besaran ILOR tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,05 yang berarti setiap penambahan 100 juta rupiah PDRB diikuti oleh penambahan 5 orang tenaga kerja, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar (-0,03) yang berarti kenaikan output pada periode 2010 tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga kerja.

Selanjutnya, pada periode tahun (2003–2007); periode (2004–2008); periode (2005–2009); periode (2006–2010) dan periode (2007–2011) rata-rata besaran ILOR adalah 0,04; 0,02; 0,03; 0,01 dan 0,01. Mencermati kondisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara penambahan penyerapan tenaga kerja dengan penambahan nilai output cenderung semakin kecil, yang berarti penyerapan tenaga kerja terhadap penambahan output khususnya dua tahun terakhir semakin kecil.

#### **4.2.15. RASIO KETERSEDIAAN DAYA LISTRIK JAWA TIMUR TAHUN 2011**

Ketersediaan daya listrik di Jawa Timur bisa dilihat dari seberapa besar kemampuan dalam membangkitkan energi listrik dan (meliputi daya/ kapasitas terpasang dan besarnya kebutuhan listrik). Seperti diketahui bersama bahwa Ketersediaan listrik merupakan suatu kebutuhan yang utama dan vital bagi kehidupan sehari-hari, utamanya dimanfaatkan untuk penerangan, kegiatan industri, konstruksi, perdagangan, teknologi multimedia dan berbagai kepentingan perusahaan-perusahaan lainnya. Sebagai upaya yang berkesinambungan akan kebutuhan listrik, maka sangatlah diperlukan ketersediaan listrik yang memadai, serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik dari tahun ketahun.

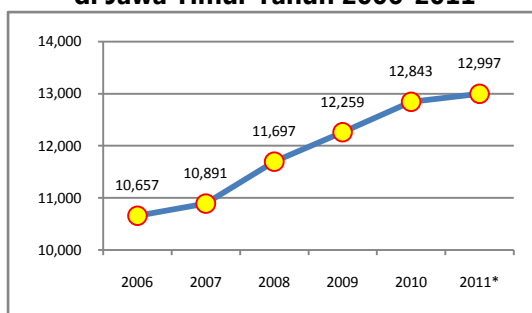
Permintaan daya listrik dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan yang pesat, sehingga diperlukan perhitungan yang matang

mengenai perencanaan untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya di Jawa Timur. Pengelolaan kelistrikan di Jawa Timur dilakukan oleh BUMN seperti Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Indonesia Power dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya PLN yang mendistribusikannya kepada masyarakat/ instansi/ perusahaan/ lembaga swasta untuk berbagai keperluan.

Kapasitas terpasang di Jawa Timur Tahun 2011 adalah sebesar 15,798 MWh, sedangkan kebutuhan listrik adalah sebesar 22.034 (MWh). Dengan demikian Ratio ketersediaan Listrik adalah sebesar 71,70 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 72 persen kebutuhan listrik sudah dikonsumsi/ dinikmati oleh berbagai pihak, baik rumahtangga, swasta, perusahaan, instansi, lembaga perusahaan lainnya. Selebihnya sebesar 28 persen adalah ketersediaan listrik yang diusahakan sendiri (mandiri) yang diusahakan untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat, termasuk juga yang masih dalam proses untuk bisa menikmati listrik bagi kehidupan sehari-hari.

#### 4.2.16. PERKEMBANGAN JUMLAH UMKM BPR/LKM JAWA TIMUR TAHUN 2006-2011

**Gambar 38**  
**Perkembangan Jumlah BPR/LKM**  
**di Jawa Timur Tahun 2006-2011**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur  
\* Angka Sementara

Dalam perkembangannya, UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup : pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, ketiga, keterbatasan

akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber informal ini beraneka ragam mulai dari rentenir hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk yang lain. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Peranan LKM dalam pembangunan ekonomi khususnya pengembangan dan pemberdayaan UMKM sangat penting sehingga menjadi salah satu fokus pembangunan.

Jumlah UMKM BPR/LKM tahun 2006 mencapai 10.657 usaha dan bertambah menjadi 10.891 usaha pada tahun 2007 atau naik 2,20 persen. Pada tahun 2008 naik 7,24 persen menjadi 11.697 usaha, tahun 2009 naik 4,80 persen menjadi 12.259 usaha, tahun 2010 naik 4,76 persen menjadi 12.843 usaha dan pada tahun 2011 diperkirakan naik 1,2 persen menjadi 12.997. Dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM BPR/LKM dan pentingnya peranan UMKM BPR/LKM dalam pembangunan ekonomi khususnya pengembangan dan pemberdayaan UMKM, maka UMKM BPR/LKM juga perlu menjadi salah satu fokus pembangunan.

#### **4.2.17. PERSENTASE KOPERASI AKTIF JAWA TIMUR TAHUN 2004-2011**

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi karena kegiatan usaha koperasi lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan.



**Tabel 4.185**  
**Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Jawa Timur**  
**Tahun 2004-2011**

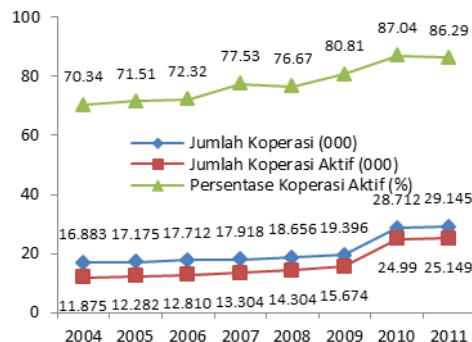
No.	Uraian	Tahun							
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Koperasi	16.883	17.175	17.712	17.918	18.656	19.396	28.712	29.145
2	Jumlah Koperasi Aktif	11.875	12.282	12.810	13.891	14.304	15.674	24.990	25.149
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	70,34	71,51	72,32	77,53	76,67	80,81	87,04	86,29

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM  
Keterangan : \* Angka Sementara

Pada tahun 2011, jumlah koperasi aktif di Jawa Timur sebanyak 25.149 unit dari 29.145 unit koperasi yang ada atau sebesar 86,39 persen dari total koperasi. Persentase koperasi aktif pada tahun 2011 turun sebesar 0,75 persen point dibanding dengan tahun 2010.

Pada **Gambar 39** dapat dilihat perkembangan koperasi selama delapan tahun terakhir. Sejak tahun 2004 jumlah koperasi total jumlah koperasi aktif di Jawa Timur selalu meningkat. Namun jika dilihat dari persentase

**Gambar 39**  
**Perkembangan Persentase Koperasi Aktif**  
**di Jawa Timur**  
**Tahun 2004-2011**



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

koperasi aktif terhadap jumlah koperasi total tahun 2004 sampai dengan 2007 persentase koperasi aktif selalu meningkat, tetapi pada tahun 2008 persentase koperasi aktif menurun sebesar 0,86 persen point dari 77,53 persen menjadi 76,67 persen. Pada tahun 2009 persentase koperasi aktif meningkat kembali sebesar 4,14 persen point menjadi 80,81 dan tahun 2010 meningkat 6,23 persen point menjadi 87,04 persen. Sementara Tahun

dan

2011 persentase koperasi aktif mengalami penurunan sebesar 0,75 persen point dari 87,04 persen menjadi 86,29 persen.

#### **4.2.18. PERKEMBANGAN JUMLAH UMKM NON BPR/LKM UMKM JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011**

Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun regional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2011 mencapai 54,32 persen. Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Oleh karena itu pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dan khususnya di Jawa Timur.

Hasil pendaftaran perusahaan Sensus Ekonomi Tahun 2006, jumlah UMKM Non BPR/LKM pada tahun 2006 sebanyak 2.504.634 usaha atau 99,58 persen dari total UMKM. Jumlah usaha yang bergerak di sektor Perdagangan besar dan eceran merupakan yang terbanyak yaitu 914.080 usaha atau 36,50 persen dari total UMKM Non BPR/LKM, sedangkan paling sedikit usaha sektor Listrik, gas dan air sebanyak 1.148 usaha atau 0,05 persen dari total UMKM Non BPR/LKM.

**Tabel 4.186**  
**Perkembangan Jumlah UKM Non BPR/LKM di Jawa Timur**  
**Tahun 2006-2010**

No	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011*
1	Jumlah UKM	2.588.989	2.636.209	2.722.189	2.795.724	2.852.198
2	Jumlah UKM Non BPR/LKM	2.578.099	2.624.512	2.709.930	2.782.881	2.839.201

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

*Keterangan : \*)Angka Sementara*

Pada tahun 2007, jumlah UMKM Non BPR/LKM meningkat sebesar 2,93 persen dari 2.504.634 usaha menjadi 2.578.099 usaha. Perkembangan tahun 2008 lebih rendah dari tahun 2007 yaitu sebesar 1,80 persen. Pada tahun 2009 jumlah UMKM Non BPR/LKM meningkat sebesar 3,25 persen dari 2.624.512 usaha pada tahun 2008 menjadi 2.709.930 usaha pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 jumlah BPR UMKM Non BPR/LKM meningkat sebesar 2,69 persen menjadi 2.782.881 usaha. Pada tahun 2011 jumlah UMKM Non BPR/LKM diperkirakan mencapai 2.839.201 atau meningkat sebesar 1,91%.

#### **4.2.19. PERKEMBANGAN JUMLAH DAN MACAM PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011**

Perubahan paradigma merupakan salah satu perubahan mendasar atau bisa dikatakan adanya reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, yang bermuara pada terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah. Salah satu aspek penting kebijakan di bidang keuangan daerah adalah kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah. Pendapatan daerah (langsung)

pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang optimal serta tidak memberatkan masyarakat.

Dalam mengupayakan peningkatan perekonomian dan pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan segala kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konsep, PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian provinsi dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Komponen PAD tersebut secara penuh harus dapat dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah agar dalam upaya penggalan sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Disamping itu, pemerintah daerah

masih perlu melakukan penanganan gejolak ekonomi dan politik yang masih terjadi beberapa tahun terakhir. Pemerintah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian yang lesu agar dapat kembali ke posisi sebelum krisis.

Informasi data jenis dan jumlah pajak yang diberlakukan di Jawa Timur diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya bernama Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk data jenis dan nilai retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selama tahun 2007, penerimaan pajak dan retribusi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 8,28 persen atau dari Rp. 3.518,52 milyar pada tahun 2006 menjadi Rp. 3.835,99 milyar pada tahun 2007. Pada tahun 2008 nilai pajak dan retribusi mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 19,93 persen atau naik sebesar Rp. 954,66 milyar. Peningkatan terjadi lagi di tahun 2009 yakni sebesar Rp. 177,13 milyar atau naik 3,57 persen. Pada tahun 2010 nilai pajak dan retribusi naik lagi sebesar 16,64 persen atau dari Rp. 4.967,77 milyar tahun 2009 menjadi Rp. 5.973,56 milyar pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011, nilai pajak dan retribusi mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu sebesar 18,89 persen atau naik sebesar Rp. 1.391,04 milyar. Keadaan ini dimungkinkan karena semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Jawa Timur terhadap wajib pajak yang harus dibayarkan serta semakin tinggi pula tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah.

**Tabel 4.187**  
**Jenis dan Nilai Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2007-2011**

Jenis Pajak/Retribusi	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Jenis Pajak</b>	<b>3.574,89</b>	<b>4.481,79</b>	<b>4.891,82</b>	<b>5.907,32</b>	<b>7.298,24</b>
Pajak Kendaraan Bermotor	1.483,71	1.697,83	2.068,03	2.269,94	2.692,58
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.256,33	1.722,67	1.789,32	2.513,49	3.366,06
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	800,56	1.024,22	996,92	1.081,27	1.217,23
Pajak Air Permukaan	17,01	18,83	18,65	21,42	22,37
Pajak Air Bawah Tanah	17,28	18,24	18,90	21,19	-
<b>Jenis Retribusi</b>	<b>261,10</b>	<b>308,85</b>	<b>75,95</b>	<b>66,24</b>	<b>66,36</b>
Retribusi Jasa Umum	214,96	259,84	22,38	12,10	7,35
Retribusi Jasa Usaha	30,71	33,40	34,77	37,35	43,17
Retribusi Perijinan Tertentu	15,43	15,61	18,81	16,79	15,84
<b>Jumlah</b>	<b>3.835,99</b>	<b>4.790,64</b>	<b>4.967,77</b>	<b>5.973,56</b>	<b>7.364,60</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Apabila dibedakan penerimaan antara pajak dan retribusi, dari tahun ke tahun penerimaan pajak Jawa Timur selalu lebih besar dibandingkan penerimaan retribusinya. Pada tahun 2007 dari penerimaan pajak dan retribusi, sebesar 93,19 persen adalah penerimaan pajak sedangkan retribusi hanya 6,81 persen. Kemudian pada tahun 2008 nilai penerimaan pajak secara nominal maupun persentase mengalami peningkatan menjadi 93,55 persen, sedangkan untuk retribusi secara nominal meningkat namun persentasenya mengalami penurunan sehingga peranannya menjadi 6,45

persen dari total penerimaan pajak dan retribusi di tahun yang sama. Tahun 2009, penerimaan pajak meningkat kembali walaupun kenaikannya tidak setinggi tahun sebelumnya namun peranannya naik cukup signifikan yaitu menjadi 98,47 persen sementara retribusi peranannya mengalami penurunan sangat drastis menjadi 1,53 persen. Secara nominal pajak pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang sangat signifikan disbanding tahun sebelumnya, namun hanya berperan sebesar 98,89 persen, sebaliknya retribusi peranannya mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 1,11 persen. Demikian pula pada tahun 2011 walaupun secara nominal nilai pajak naik cukup berarti dibanding tahun sebelumnya namun peranan pajak naik sedikit hingga menjadi sebesar 99,10 persen, sementara untuk retribusi walaupun secara nominal naik namun peranannya turun kembali sehingga mempunyai peranan sebesar 0,90 persen.

Jika diperhatikan per jenis pajak, ternyata penerimaan pajak terbesar ( $\pm$  99 persen) berasal dari jenis pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Hal ini diduga karena semakin meningkatnya minat masyarakat Jawa Timur yang menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum terutama jenis kendaraan roda dua. Kondisi tersebut dapat dilihat dari padatnya lalu lintas di jalan terutama di kota-kota besar yang ada di Jawa Timur. Pada tahun 2007, nilai ketiga jenis pajak tersebut sebesar Rp. 3.540,60 milyar atau bisa dikatakan 99,04 persen pajak yang diterima berasal dari ke tiga jenis pajak di atas. Tahun 2008, pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor naik cukup signifikan menjadi Rp. 4.444,72 milyar atau naik sebesar 25,54 persen atau dapat dikatakan pajak yang diterima oleh pemerintah Jawa Timur mendapat sumbangan sebesar 99,17 persen dari pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar 9,21 persen, tahun 2010 naik

lagi sebesar 20,82 persen, dan tahun 2011 mengalami peningkatan lagi hingga sebesar 24,06 persen.

Dilain sisi jika dilihat per jenis retribusi, penerimaan dari retribusi terbesar ( $\pm$  80 persen) berasal dari Restribusi Jasa Umum. Pada tahun 2007 dan 2008 retribusi jasa umum menyumbang 82,33 persen dan 84,13 persen dari total retribusi yang diterima. Tetapi pada tahun 2009 hingga 2011 peranan retribusi Jasa Umum mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu hanya sebesar 29,46 persen, 18,27 persen dan 11,07 persen, sebaliknya justru peranan retribusi Jasa Usaha mempunyai peranan cukup baik. Pada tahun 2007 dan 2008 peranan retribusi Jasa Usaha hanya berkisar sebesar 10 - 11 persen, kemudian tahun 2009 sampai dengan 2011 peranannya meningkat tajam menjadi 45,78 persen, 56,38 persen dan 65,05 persen. Sedangkan untuk retribusi Perijinan tertentu pada tahun 2007 dan 2008 berperan sekitar 5 persen, namun pada tahun 2009 hingga 2011 meningkat menjadi sekitar 25 persen. Menurut informasi yang didapat dari Dispenda Provinsi Jawa Timur kondisi ini terjadi semenjak tahun 2008 karena penerimaan kas pada Restribusi Jasa Umum mengalami penurunan seperti dari RS. Dr. Sutomo Surabaya, RS. Haji Surabaya, RS. Soedono Madiun dan RS. Saiful Anwar Malang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### **4.2.20. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR TAHUN 2011**

Jawa Timur adalah salah satu wilayah yang dikaruniai potensi sumber daya energi dan mineral yang cukup beragam dan melimpah yang tersebar di beberapa daerah Kabupaten. Jika ditelusuri dari sumber sumber kekayaan alam yang ada, dikelompokkan menjadi dua sumber daya mineral: mineral energi (minyak dan gas bumi serta panas bumi) dan mineral bahan galian logam/non-logam/industri (pasir



timah, sulfur, fosfat, mika, belerang, fluorit, felspar, ziolit dan diatomea)

Hasil Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Jawa Timur ditinjau dari potensi kekayaan alam yang dimiliki diantaranya berupa hasil bahan galian/ tambang

yang tersebar di

beberapa wilayah

Kabupaten.

Potensi sumber daya mineral energi di Jawa Timur merupakan angin

segar yang membawa optimisme masa depan sumber daya energi di Indonesia. Dari data yang ada yang bersumber dari hasil survei penggalan yang dilakukan BPS dan data dari Dinas Energi Sumber Daya & Mineral (ESDM) Jawa Timur, khususnya pengelolaan mineral bahan galian diperoleh data luas areal sebesar 68.721 Ha dibandingkan tahun sebelumnya seluas 68.999 Ha atau mengalami sedikit penurunan sebesar 0,39 persen. Dari luas areal sumber daya alam yang ada walaupun sedikit mengalami penurunan, produksi yang dihasilkan juga terus diupayakan meningkat sejalan dengan transisi kebijakan baru di sektor pertambangan/ penggalan. Jumlah tenaga kerja di sektor penggalan pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari 94.226 menjadi 137.003 sebesar 45,39 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio Luas Areal Pengelolaan Sumber Daya Alam terhadap luas keseluruhan/ Budi Daya adalah sebesar 1,90 persen. Hal ini terlihat masih relatif kecil, karena dari tahun ke tahun penggunaan lahan terus mengalami pergeseran, utamanya untuk perumahan/ pemukiman yang terus semakin berkembang.

**Tabel 4.188**  
**Beberapa Perkembangan Sektor Pertambangan**  
**Jawa Timur Tahun 2010 - 2011**

No.	Uraian	Satuan	2010	2011 *)
1.	Jumlah IUP	Perush.	282	287
2.	Luas Areal	Ha	68.999	68721
3.	Produksi	Ton	12.059.049,45	17.903.895,02
4.	Tenaga Kerja	Orang	94.226	137.003

*Sumber : Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Jatim*

#### **4.2.21. RASIO PDRB YANG DIBANGKITKAN UKM TERHADAP TOTAL PDRB TAHUN 2010-2011**

Kontribusi yang cukup besar mampu diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Jawa Timur. Selain itu tidak hanya sebagai kontributor ekonomi, UMKM mampu berperan sebagai katub penyeimbang pembangunan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah oleh UMKM yang relatif stabil dibandingkan dengan usaha besar. Nilai tambah dari UMKM ini dapat diukur dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh UMKM.

PDRB yang dihasilkan oleh UMKM Jawa Timur pada tahun 2011 mengalami peningkatan, baik yang dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Pada tahun 2010 PDRB UMKM ADHB Jawa Timur tercatat sebesar Rp. 418,97 triliun, atau mempunyai rasio sebesar 53,82 persen dari total PDRB Jawa Timur. Nilai ini meningkat menjadi Rp. 487,87 triliun pada tahun 2011. Jika dibandingkan dengan total PDRB, rasio PDRB yang disumbangkan UMKM terhadap total PDRB Jawa Timur sebesar 53,95 persen. Dengan demikian pada tahun 2010 terakhir terjadi peningkatan kontribusi PDRB UMKM sebesar 0,13 persen.

Sementara PDRB UMKM yang dihitung berdasarkan ADHK masing-masing sebesar Rp. 183,58 triliun (2010) menjadi Rp. 183,58 triliun (2011), atau masing-masing mempunyai kontribusi terhadap pembentukan total PDRB sebesar 53,64 persen (2010) dan 53,77 persen (2011).

**Tabel 4.189**  
**PDRB UMKM Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000**  
**2010-2011 (Miliar Rp.)**

Lapangan Usaha	2010		2011	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1. Pertanian	109,671.60	46,673.99	121,097.62	48,691.49
2. Pertambangan dan Penggalian	10,523.88	4,942.89	10,985.15	5,012.67
3. Industri Pengolahan	63,266.55	25,400.21	70,223.57	26,486.96
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	52.21	32.99	56.62	34.70
5. Konstruksi	14,280.08	4,841.92	17,966.13	5,420.76
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	152,521.08	70,413.64	183,067.37	78,260.93
7. Angkutan dan Komunikasi	15,868.42	7,440.62	17,791.62	8,014.16
8. Keuangan, Jasa Persewaan, dan Jasa Perusahaan	14,522.78	6,882.99	16,509.10	7,405.20
9. Jasa-jasa	38,262.76	16,954.52	43,170.57	17,867.11
<b>Total PDRB</b>	<b>418,969.36</b>	<b>183,583.77</b>	<b>480,867.75</b>	<b>197,193.99</b>

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur*

Secara total, pembentukan PDRB UMKM pada tahun 2011 tertinggi pertama dan kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (Rp. 78,26 triliun) dan sektor pertanian (Rp. 48,69 triliun). Dilihat dari sisi level pertumbuhannya, laju pertumbuhan PDRB UMKM pada tahun 2011 di Jawa Timur sebesar 7,42 persen, tertinggi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) sebesar 11,17 persen, diikuti sektor konstruksi 11,00 persen. Sektor pertanian yang juga merupakan penghasil komoditas unggulan Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 4,21 persen, dan yang paling rendah dibanding sektor lainnya adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar 1,75 persen.

Sebagaimana Tabel 4.22 proporsi PDRB yang dibangkitkan oleh UMKM pada tahun 2011 terhadap total PDRB sebesar 53,95 persen, terbesar di sektor pertanian (85,73 persen), diikuti sektor PHR (66,49 persen) dan sektor jasa-jasa (57,56 persen). UMKM yang mempunyai rasio terkecil dalam pembentukan PDRB terhadap total PDRB adalah sektor

listrik, gas dan air bersih (LGA) dengan rasio sebesar 0,44 persen. Ini menunjukkan bahwa sektor ini didominasi oleh usaha berskala besar.

Besar proporsi UMKM terhadap PDRB yang melebihi 50 persen, jelas sekali memperlihatkan bahwa UMKM memberikan peran yang cukup besar pada pembentukan PDRB. Tentunya sangatlah wajar, jika pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap UMKM agar tidak sekadar bertahan di kancah ekonomi tetapi juga bisa bersaing di tengah persaingan global. Salah satu kelebihan dari UMKM ini adalah spesifikasi SDM yang tidak terlalu khusus terutama pada UMKM non formal, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.

**Tabel 4.190**  
**Rasio PDRB UMKM Terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011**  
**(Miliar Rp.)**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>Total PDRB</b>	<b>UMKM</b>	<b>Proporsi</b>
1. Pertanian	141,260.34	121,097.62	85.73
2. Pertambangan dan Penggalan	19,899.30	10,985.16	55.20
3. Industri Pengolahan	240,353.16	70,223.57	29.22
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	12,743.04	56.62	0.44
5. Konstruksi	41,628.77	17,966.15	43.16
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	266,882.82	183,067.33	68.59
7. Angkutan dan Komunikasi	50,206.34	17,791.62	35.44
8. Keuangan, Jasa Persewaan, dan Jasa Perusahaan	43,400.71	16,509.10	38.04
9. Jasa-jasa	75,004.74	43,170.57	57.56
<b>Total PDRB</b>	<b>891,379.22</b>	<b>480,867.75</b>	<b>53.95</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

#### **4.2.22. PERANAN APBD TERHADAP PDRB TAHUN 2007-2011**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Pelaksanaan pembangunan seyogyanya dilaksanakan secara serasi, selaras dan terpadu antar sektor.

Terkait dengan hal di atas, maka Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perencanaan pembangunan. Penyusunan anggaran tersebut ditata dalam suatu sistem anggaran yang gunanya untuk meningkatkan penyelenggaraan di daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun pembangunan.

APBD memuat seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk pemerintah daerah. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD dirinci dalam berbagai pos anggaran. Secara umum realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur independen.

Jika APBD merupakan besaran anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu wilayah pada kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Bila dibandingkan, maka besaran APBD hanya merupakan bagian kecil dari PDRB. Namun demikian, peran APBD dalam perekonomian tidak dilihat dari besar kecilnya nominal, tetapi dari nilai kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi (PDRB).

APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun pada periode 2006–2010 cenderung meningkat. Pada tahun 2007 APBD Provinsi Jawa Timur naik sebesar 16 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2008 naik sebesar 19 persen, kemudian tahun berikutnya (2009) mengalami kenaikan lagi sebesar 11 persen, sedangkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 38 persen.

Jika dilihat rasio APBD Jawa Timur terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan walaupun naiknya rasio tersebut tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan pada periode tersebut terjadi kegiatan ekonomi yang relatif stabil. Pada periode 2006 - 2009 rasio APBD

mencapai kisaran 1,09 - 1,14 persen. Hal menunjukkan pada periode tersebut terjadi kegiatan ekonomi di sektor riil yang semakin baik, karena dengan APBD yang cenderung stabil mampu meningkatkan nilai tambah PDRB. Besaran rasio APBD terhadap PDRB pada tahun 2009 tersebut menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Jawa Timur cukup baik karena angka yang dicapai lebih kecil jika dibandingkan dengan standar kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 1,45 persen. Pada tahun 2010 rasio APBD Provinsi Jawa Timur terhadap PDRB Jawa Timur juga semakin meningkat yaitu sebesar 1,38 persen. Ini menggambarkan bahwa di tahun 2010 kinerja Pemerintah Jawa Timur semakin membaik jika besaran standar kinerja yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 4.191**

**Peranan APBD Terhadap PDRB Tahun 2007-2011**

<b>Uraian</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PDRB ADHB (Juta Rupiah)	536.981.881,91	621.391.674,61	686.847.557,72	778.565.772,46	884.143.574,81
2. APBD Provinsi Jawa Timur (Juta Rupiah)	5.940.048,02	7.075.105,41	7.827.694,82	10.764.886,39	12.800.302,15
3. Peranan APBD thd PDRB Jawa Timur ADHB (Persen)	1,11	1,14	1,14	1,38	1,45

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur*

Sampai dengan saat ini peranan pemerintah masih cukup besar, namun besarnya peranan pemerintah bukan hanya dinilai dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Bagi masyarakat Jawa Timur peran pemerintah yang paling berarti adalah dampak positif akibat kebijakan

publik yang dibuat. Rasio APBD terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2007 mengalami kenaikan hingga mencapai angka sebesar 1,11 persen, kemudian dua tahun berikutnya naik menjadi 1,14 persen. Selanjutnya pada tahun 2010 rasio APBD mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 1,38 persen. Pada tahun 2011 peranan APBD mengalami peningkatan lagi menjadi 1,45 persen. Jika peran masyarakat yang disebabkan kebijakan publik yang mengena semakin besar, maka persentase peranan APBD terhadap PDRB ADHB akan terjadi sebaliknya yaitu persentasenya akan menurun.